

Dr. Drs. H.M.Wagianto, SH. MH

**KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Penerbit
Arjasa Pratama**

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Oleh:

Dr. Drs. H.M.Wagianto, SH. MH

Penyunting : M.Ulil Hidayat

Desain Cover : Khoirul Wildan

Diterbitkan Oleh :

Arjasa Pratama

Jl.P Tirtayasa, Gang P.Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung.

cvarjasapratama@gmail.com | 0721-5640386

Anggota IKAPI Jakarta

[www. arjasapratama.com](http://www.arjasapratama.com)

cetakan pertama : Juni 2017

ISBN : 978-623-92760-5-8

Sanksi Pelanggaran

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tulisan ini. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga, kita sebagai mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhrat.

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya melestarikan tradisi keilmuan, dalam tataran tekstual dan kontekstual sehingga mutu hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya teori-teori hukum sekaligus pengembangannya dalam realitas kehidupan sosial. Tulisan yang telah diselesaikan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kemajuan peradaban.

Tulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan khususnya Lembaga Hukum di Provinsi Lampung. Kami berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan berguna bagi pembangunan dan masyarakat. Kami juga berharap, hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan bagi pengambil kebijakan dalam rencana program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengetahuan tentang hukum pidana.

Demikian, semoga hasil penelitian ini terealisasi sebagai amal ibadah, memperkaya pengetahuan hukum, bermanfaat bagi pembangu dan masyarakat, meski masih ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juni 2017

Peneliti

BIODATA PENULIS

Dr. Drs. H.M.Wagianto, SH. MH, lahir di Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu pada 11 Januari 1962 yang sekarang berdomisili di Jln. Imam Bonjol Gg. Terong, Kemiling Bandar Lampung.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pajaresuk pada tahun 1975, pendidikan dilanjutkan pada Sekolah Teknik Pembangunan Pringsewu dan selesai pada tahun 1979. Dan tamat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 pada tahun 1982. Di jenjang perkuliahan Penulis sempat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, namun dilanjutkan di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung dan memperoleh ijazah Sarjana pada tahun 1989, juga Fakultas Hukum Unisab Bandar Lampung selesai pada tahun 1997, pendidikan tingkat Magister penulis dilanjutkan di Fakultas Hukum UNILA Program Magister Hukum yang diselesaikan pada tahun 2001, dan pada tingkat Doktoral penulis menyelesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2010.

Pengalaman Organisasi Penulis pada tahun 1985-1990 menjadi Wakil Bendahara Nahdlatul Ulama Wilayah Lampung, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN R.Intan Lampung. Sekretaris Biro Hukum MUI Provinsi Lampung. Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesai (Lesbumi) PW NU Lampung. Ketua Yayasan Al Muttaqien dibidang pendidikan dan Pondok Pesantren : PAUD, TK, SD, SMP,SMA. Pimpinan Pondok Pesantren Al Muttaqien Lampung. Anggota Pinesepuh Maiyah Nusantara.

Jenjang karir penulis pernah menjadi Dosen tetap Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung dan sekarang juga menjadi Dosen tetap Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Mata Kuliah Sosiologi Hukum. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Bahasa IAIN Raden Intan Lampung. Setelah itu menjabat sebagai Sekretaris Prodi Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan sekarang penulis diberi amanah untuk memangku 248 jabatan sebagai Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: “Kami mendengar dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung

(QS.An-Nur:51)

Seseungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara mereka supaya kamu menetapkan dengan adil

(QS. An-Nisa:58)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RIWAYAT HIDUP.....	ii
MOTTO	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN HUKUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Kebijakan	17
B. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen.....	30
C. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ekonomi	33
D. Pengertian Korupsi	35
E. Beberapa Penuturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
F. Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana	54

BAB III PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM 12M L

A. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.....	59
B. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.....	62

BAB IV HUBUNGAN ANTARA APARAT DAN ENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KASUS TERPIDANA KORUPSI

A. Hubungan antara aparat dan penegak hukum.....	88
B. Beberapa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran 	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum di Indonesia diarahkan agar hukum mampu berperan dalam penunjang pembangunan segala bidang. Hukum didayagunakan tidak hanya sekedar untuk ketertiban sarana social, tetapi juga untuk perubahan social (A. Mukti Fadjar, 1996: 23).

Perubahan social kaitanya dengan fungsi hukum di dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Antonoc AG. Peters bahwa ada tiga persepektif dari fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu : *Perspektif control social, perspektif social engineering dan persepektif emansipasi masyarakat daripada hukum*(Ronny Hanitio Soemitro: 1985: 10)

Fungsi hukum di dalam masyarakat di atas dapat dipahami adalah sebagai berikut :

- a. Perspektif control social maksudnya adalah bahwa hukum dijadikan alat untuk mempersatukan masyarakat, mengikuti masyarakat karena ada solidaritas di antara anggota-anggotanya. Dan bagi pelanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- b. Menggunakan hukum sebagai mekanisme, adanya hukum berdasarkan kehendak penguasa. Kemudian dibuatlah peraturan-peraturan yang memaksa masyarakat untuk mematuhiya;
- c. Perspektif emansipasi masyarakat adalah bahwa hukum terbentuk dari bawah (*bottom up*), yaitu hukum merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, untuk melindungi masyarakat, membatsai kewenangan penguasa dan sekaligus hukum mendorong perubahan-perubahan social dan pembangunan.

Pembangunan hukum yang dapat mendorong perubahan social dan pembangunan pada umumnya. Sebagaimana konsekuensi logis jika pembangunan direncanakan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu kemajuan yang lebih baik pula, namun sebaliknya dapat pula berimplikasi buruk terhadap pembangunan itu sendiri. Dan ada beberapa dampak negatif dalam pembangunan itu, yakni berupa penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri dan pelanggaran hukum lainnya. Misalnya:

1. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan ; yakni penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah, Lembaga Tinggi (DPR). Pejabat penegak hukum yang merugikan kepentingan/keuangan negara.
2. Individu adalah dengan sengaja memperkaya diri untuk kepentingan diri sendiri dengan melakukan, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dapat merugikan keuangan negara; Bentuk konkretnya seperti kejahatan korporasi, Asosiasi kriminal atau individu yang terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (*Preferential treatment*)

Dari dampak buruk adanya pembangunan tersebut diatas, berikut ini dikemukakan berdasarkan observasi/pengamat yang terangkum dari beberapa *mass media* yang terbit secara nasional, maupun di Lampung. Beberapa contoh antara lain adalah : kasus Bank Bali senilai Rp. 904 miliar yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan beberapa waktu lalu, majelis hakim yang dipimpin Soedarto memvonis bebas dan melepaskan Joko S. Tjandra. Dugaan korupsi dengan nilai terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia itu mengepis dan terlihat sempit : ini soal perdata (bukan pidana) karena menyangkut soal *cessie* (pengalihan hak piutang). Padahal telah jelas-jelas menilai uang public untuk keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara (Trans Sumatra, 18-9-2000).

Kasus lain yang tidak kalah pentingnya adalah kasus Tommy Soeharto dan koleganya Ricardo Gelael dalam kasus tukar guling (ruislag) antara bulog dan PT. Goro Batara sakti senilai 905 miliar. Dan dalam putusannya masing-masing harus mendekam di penjara 1 tahun 8 bulan. Hal ini hanya Ricardo Gelael yang menjalaninya, sementara Tommy tidak melakukan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung 1 tahun 8 bulan dengan denda Rp. 35 miliar, yang pada akhirnya ditetapkan sebagai buron Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menjalankan, sementara Tommy Soeharto tidak melakukan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung 1 tahun 8 bulan dengan denda Rp. 35 miliar, yang pada akhirnya ditetapkan sebagai buron Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus dugaan korupsi di Lampung antara lain adalah : Disbun, BRI, PDAM, Tanjung karang Plaza, dll. Sedangkan kasus lainnya yaitu Gempa Liwa yang dikenal dengan GL 99 yang melibatkan

empat orang terdakwa kasus korupsi dana bantuan Gempa Bumi Liwa senilai Rp 99 miliar (GL 99) divonis bebas karena pemotongan dana proyek 2,5% dan setoran ke rekening-rekening pejabat tertentu tidak melanggar hukum, bahkan sempat dipuji majelis hakim sebagai tindakan yang cerdas. Tetapi yang jelas, siapa pun mahluknya, harus ada yang bertanggung jawab atas raibnya uang Rp. 99 miliar itu (Trans, 18-9-200).

Kasus-kasus korupsi yang muncul di tahun 2001 diantaranya kasus Probosutejo selaku Direktur Utama PT Menara Hutan Buana (MHB), tersangka kasus hak Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan yang merugikan keuangan atau PT. MHB memanipulasi angka sehingga merugikan negara Rp. 49 triliun lebih, belum termasuk bunganya (Trans, 20-2-2001). Dan kasus korupsi lainnya dengan tersangka Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) atas telah dicekal dengan Surat Keputusan Pencetakan Bernomor : E.419/D/DSP 3/11/2000 tanggal 24 November 2000 (Trans, 20-2-2001).

Kasus yang hangat lainnya adalah tersangka Ginanjar Kartasasmita dalam kasus *Technical Assistance Contract* (TAC) Pertamina dengan PT Ustraindo Petro.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, baik dalam skala umum/nasional maupun di Provinsi Lampung, perlu dicerminkan kasus kasus yang telah memiliki kekuatan hukum (telah divonis) ataupun yang masih dalam proses penyidikan serta dalam proses peradilan. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Kebijakan penegakan hukum tersebut erat kaitanya dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia " (Barda Nawawi Arief, 1996:31)

Kebijakan penegakan hukum itu sendiri berarti juga membicarakan mengenai aparat penegak hukum, jika membicarakan aparat penegak hukum maka tidak terlepas dari polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Oleh karena itu dalam upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mampu menempatkan diri secara adil bagi pencari keadilan dan demi kepastian hukum. Hal ini perlu dipahami itu perlu diskresi yang mempunyai makna "kebijaksanaan, keleluasan atau... suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada hukum untuk penerapan yang dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan" (Kadri Husin, 1999:2-3)

Adanya diskreasi atau kebijakan penegakan hukum itu disebabkan oleh dilematisnya kasus tindak pidana korupsi, baik secara nasional maupun Propinsi Lampung. Dan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang paling sulit adalah adanya bukti-bukti yang mendukung apakah dugaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu akan diproses dari menjadi saksi, kemudian diteruskan menjadi tersangka, dan seterusnya dalam proses peradilan. Dan yang tidak dapat dipungkiri dalam kebijakan penegakan hukum terhadap kasus korupsi salah satunya adalah adanya intervensi dari penyelenggara negara atau pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap proses peradilan dari para koruptor. Namun disisi lain kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dapat membrantas tindak pidana korupsi, setidaknya-menjadikan jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sekaligus menjadi pelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Letak kesulitan terhadap penyelesaian proses peradilan dari para koruptor itu adalah:

1. Tidak adanya komitmen dari aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
2. Masih lemahnya aturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan banyak penafsiran;
3. Rendahnya moral para aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya (LBH.BL dan IKADIN, Korupsi dan Kerugian Negara, Trans, 21 Sept. 2000 :4)

Pernyataan di atas (poin 2) kaitanya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Undang-Undang tersebut tidak memuat aturan peralihan, dari segi teknik perundang-undangan itu sangat aneh. Padahal aturan peralihan merupakan salah satu teknik standar pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan pada umumnya (*beluitan van algemene strekking*). Aturan peralihan bukan sekedar mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), tetapi merupakan sebuah politik hukum yang berisikan kebijakan pembentukan peraturan mengenai hukum yang ada pada saat dibentuk peraturan baru.

Aturan itu berkenaan dengan keberadaan hukum lama akibat kehadiran hukum baru. Secara umum berlaku asas "hukum baru" meniadakan " hukum yang lama". Hukum lama yang secara asas tidak berlaku lagi dapat tetap dijalankan kalau hukum baru memberi tempat seperti aturan peralihan. Aturan peralihan juga menentukan ketentuan hukum yang harus diterapkan, baik lama atau baru pada saat peristiwa hukum yang dibuat berdasarkan atau terjadi pada saat hukum lama

berlaku. Dan dalam situasi induk hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia, asas umum mengenai ruang lingkup hukum pidana menurut waktu sudah diatur dalam aturan umum. Buku I KUHP khususnya pasal 1 yang intinya mengandung dua asas:

1. *Asas Lex Temporis Delicti*, yaitu Undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang pada saat delik dilakukan (ayat 1);
2. Asas yang mengatur tentang adanya perubahan perundang-undangan, yaitu dalam hal ada perubahan perundang-undangan, diberlakukannya aturan yang menguntungkan/meringkankan (ayat 2), lihat pada Buku Ralat Bunga Rampai on Kebijakan Hukum Pidana (Barda Nawawi Arief : 2000:43).

Dalam memahami bidang hukum pidana berlaku pula "asas umum" kalau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pidana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dari teori perundang-undangan tidak sesederhana itu. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas mengatakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tidak berlaku. Namun Undang-Undang NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diadili, baik atas dasar perbuatan tersebut, kehilangan sifat pidana, maupun karena asas lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Disamping itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi kolusi dan Nepotisme).

Dari kedua Undang-Undang diatas seharusnya dapat dijalankan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka akan dikenakan sanksi dari UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Latar belakang yang demikian ini barangkali para aparat penegak hukum di dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum sering mendapat sorotan dan berbagai pertanyaan, akan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tidak dapat diproses melalui peradilan dengan landasan Undang-Undang yang berlaku demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pula yang menarik untuk diteliti mengenai “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)”.

B. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas 1 A tanjungkarang?
- b. Bagaimana hubungan antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sampai kepada proses peradilan?
- c. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

- (a) Lingkup bidang ilmu “hukum pidana ekonomi”, khususnya yang membahas tentang system peradilan pidana (SPP)
- (b) Lingkup substansinya adalah masalah tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang;
- (c) Studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumnya, khususnya dalam kurun waktu 1997 sampai dengan tahun 2001

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian Penelitian

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sesuai dengan permasalahan, yakni untuk:

- a. Menganalisis tentang penerapan kebijakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
- b. Menganalisis tentang hubungan antara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan praktisi hukum mengenai penanganan tindak pidana korupsi mulai dari pengadilan atau penangkapan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penahanan, proses peradilan sampai pada putusan pengadilan, serta pemindahan yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Perasyarakatan.
- c. Menginventarisasi dan mengidentifikasi serta menganalisis tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik secara prosedural, konstitusional, kondisi di lapangan serta masyarakat pendukung hukum itu sendiri.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- (a) Menganalisis secara teoritis tentang korupsi dalam kajian sistem peradilan pidana serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- (b) Menganalisis terhadap putusan pengadilan tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah diproses melalui pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang telah mempunyai kekuatan hukumnya yang tetap.
- (c) Menganalisis tentang kebijakan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Propinsi Lampung.
2. Secara teoritis dapat memberikan sumbang pikiran bagi khasanah ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana ekonomi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teori sesuai dengan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka ada dua teori yang akan diambil sebagai pendukung grand theory, yaitu :

1. Teori Marc Ancel, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen, yaitu *criminologi*, *criminal law*, dan *penal policy* (Marc Ancel, 1965:4-5).

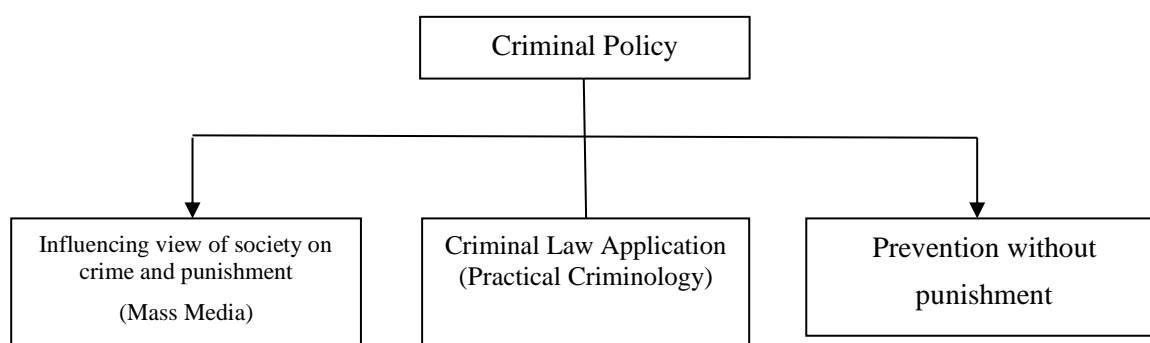
Pada *penal policy* yang lebih mendekati dengan kebijakan penegakan hukum, dan makna *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya. Mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para tidak atau pelaksana putusan pengadilan (Barda Nawawi Arief, 1996:23).

Pendapat di atas lebih mendukung pembuat Undang-Undang (legislatif dan eksekutif) dan pelaksana atau penerap UU, baik itu pengadilan yang unsur pelaksanaannya adalah jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus, dan kejaksaan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Dalam penerapan itu perlu adanya pendekatan, tidak dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, melainkan juga dengan pendekatan secara sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lain (Barda Nawawi Arif, 1996. 24).

Pendapat di atas dapat dipahami, bahwa kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak terfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang Integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Maksudnya adalah untuk mengungkapkan beberapa kasus tindak pidana korupsi perlu adanya sarana pendukung lainnya seperti kebijakan kriminal (*criminal policy*) juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakan hukum atau "law enforcement" sehingga beberapa kasus tindak pidana korupsi dapat terungkap dan dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Selanjutnya, kebijakan penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teorinya G. Peter Hoeffnagels yang menggambarkan *criminal policy* dengan ragaan seperti dibawah ini.



<ul style="list-style-type: none"> • adm, of crime, justice in narrow sence : - crim, legislation - crim, jurisprudence - crim proses in wide sence sentencing • forensic psychiatry and Psychology • crime, sentence execution, and policy statistic. 	<ul style="list-style-type: none"> - social policy - community planning mental health - national mental health social work child welfare - administrative & civil law
--	---

Skema tersebut terlihat bahwa menurut teori G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang "Keahatan dan pembedanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishmentl mass media*) (Barda Nawawi Arief, 1996: 48)

Upaya penanggulangan kejahatan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ternyata ada relevansinya sebab diantara upaya itu ada konsekuensi logis adanya tindakan tegas penerapan sanksi pidana; penerapan sanksi tindak pidana korupsi tanpa dipidana penjara, ini barangkali masih sebagai wacana untuk pembaruan hukum pidana di masa yang akan datang, bahwa sanksi tindak pidana korupsi tidak harus dipenjara melainlan dengan upaya lain seperti denda dan/atau tanpa pidana kurungan, tetapi terkena sanksi wajib lapor untuk setiap minggunya.

Mass media memberian opini publik (*public opinion*) dapat memberikan ada positif dan negatif. Positif jika dilakukan untuk membuat jera, masyarakat makin taat dan mengerti untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan negatifnya apabila seseorang yang belum tentu melanggar hukum atau masih diduga melakukan tindak pidana korupsi, tetapi mass media

telah mempengaruhi mempengaruhi (membuat opini masyarakat) seolah-olah seseorang tersebut sudah dihakimi sebelum menjalani proses peradilan. Namun pendapat FP Hoeffnagels sebagai kerangka teoritis yang kedua untuk membahas kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

3. Teori Goldstein dalam penegakan hukum sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, ada 3 (tiga), yakni pertama *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of No Enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Penegakan hukum kedua, yaitu *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana yang kesemuannya mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan yang *Actual Enforcement* (Barda Nawawi Arief, 1986: 12).

Berdasarkan teori Goldstein di atas kaitannya dengan kebaikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi lebih mengarah kepada *Actual Enforcement*, yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum secara actual enforcement melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum.

2. Konseptual

Untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran maka akan dijelaskan beberapa batasan istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan atau disebut juga politik kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi (Sudarto, 1981: 113). Dan kebijakan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
2. Penegakan hukum (*law enforcement*) ialah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tejabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *Social control*), dalam kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 13). Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana ada tiga yaitu : pertama, total enforcement yaitu penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana; kedua, full enforcement yaitu bahwa para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal; dan ketiga adalah actual enforcement (Sunarto, 1992:87) Dari pengertian di atas, bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Korupsi, diintroduksi dari bahasa Belanda "corruptie" yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah (The Lexicon Wehster Dictionary, 1978:416).

Pengertian korupsi di atas jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (Pasal 2 ayat (1);
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3);
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 13);

4. Studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ialah penelitian tentang beberapa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang mengenai tindak pidana korupsi yang telah melalui proses peradilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Bahwa spesifikasi penelitian ini adalah bersifat eksploratoris sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Eksploratoris dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang fenomena yang ada, yakni upaya penegakan hukum terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi, selanjutnya diuraikan secara cermat berdasarkan fakta yang ada kedalam aspek-aspek hukum *criminal policy* untuk penyelesaian kasus korupsi yang merupakan keuangan negara.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yang bersifat penelitian normatif dan empiris, maksudnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian secara yuridis normatif adalah dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, seperti Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lainnya
- b. Penelitian secara yuridis empiris adalah berdasarkan fakta di lapangan berkaitan dengan penegak hukum, penilaian hukum yang ada kaitannya dengan Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, dan praktisi hukum. dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

3. Daerah Penelitian

Adapun daerah penelitian ini sesuai dengan judul tesis adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang,

4. Sumber dan jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni :

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan praktisi hukum.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang mencakup
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1995, Undang-Undang Tahun 1997 dan Peraturan lainnya yang ada relevansinya.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum. primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil putusan pengadilan, peraturan pelaksanaan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, literatur, majalah, surat kabar (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995:13).

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian tesis ini adalah para aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang. Serta kasus tersebut telah mempunyai putusan pengadilan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun populasinya dalam satu putusan pengadilan melibatkan aparat penegak hukum, seperti jaksa penuntut umum 1 (satu) orang, hakim terdiri dari ketua dan hakim-hakim anggota sebanyak 5 (lima) orang, ketua Pengadilan Negeri I (satu) orang, panitera pengganti 1 (satu) orang, penasehat hukum 2 (dua) orang jumlah seluruhnya ada. 10 orang.

Selanjutnya dalam menentukan sampel dari populasi yang akan direeliti, maka digunakan teknik penarikan sampel, yaitu "*Purposive Sampling*" dimaksudkan bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan yang telah dianggap mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai.

Mengingat jumlah aparat penegak hukum yang terlibat dalam satu putusan Pengadilan Negeri ada 10 orang dan untuk Pengadilan Tinggi ada 10 orang. Dan untuk satu kasus yang

telah diputus di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara banding, maka jumlah aparat penegak hukum yang menjadi populasi sebanyak 20 orang. Oleh sebab itu mengingat pula keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis maka aparat penegak hukum yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Polisi 1 (satu) orang yang diwakili oleh Kadit Reserse Polda Lampung untuk memperoleh data dan atau tidaknya keterlibatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.
- b. Jaksa 2 (dua) orang yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung. .
- c. Hakim 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang dari Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- d. Penasehat Hukum 2 (dua) orang yang salah satunya turut serta sebagaimana penasehat hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
- e. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungkarang 1 (satu) orang dari Kasub Registrasi, hal ini dimaksudkan ada atau tidaknya upaya pembinaan terhadap terpidana kasus korupsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data primer, yakni dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara secara *indept study* dengan aparat penegak hukum pada Pengadilan negeri Kelas I A Tanjungkarang, aparat Kejaksaan Tinggi Lampung, aparat Polda Lampung, aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Tanjungkarang, dan Praktisi Hukum (Pengacara-Konsultan Hukum)
- b. Untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi pustaka, membaca, menelaah, dan menyeleksi bahan-bahan pustaka baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan penelitian.

7. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalul kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalul pengolahan dan penyaj'ian data yang mencakup kegiatan :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenal kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh yang ada relevansinya dengan penulisan.
- b. Coding, yaitu pengelompokan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistimatisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dan kajian teoritis secara sistematis, sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Pada Bab I yang merupakan bab pendahuluan meliputi : Latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, daerah penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, rancangan analisis serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan Tinjauan Pustaka yang meliputi : Pengertian kebijakan, sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen, fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan ekonomi, pengertian korupsi, beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya akan diuraikan mengenal penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana.

Bab III pada bab ini merupakan pokok bahasan dari hasil penelitian yang meliputi : Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, hubungan antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

BAB IV pada bab ini merupakan penutup yang berisikan : Kesimpulan yang meliputi : kesimpulan umum yakni adanya temuan-temuan dari hasil penelitian dan kesimpulan khusus, yaitu berupa jawaban dari permasalahan dari buku ini serta saran. Dan pada bagian akhir dimuat daftar pustaka dan beberapa lampiran.

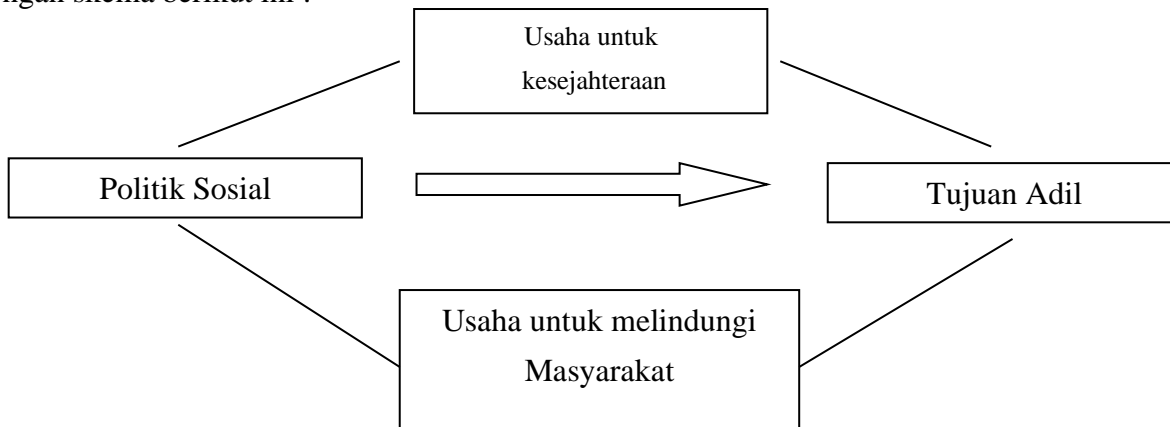
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKANPENGUNAAN HUKUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Kebijakan

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*Policy*", yang bermakna, politik, kebijaksanaan (Mahmud Mahyong- 1997: 202).

Kebijaksanaan yang dimaksudkan antara lain meliputi : kebijakan politik kriminal, politik sosial, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Hal itu erat kaitannya dengan pembangunan nasional yang dikaitkan dengan pembangunan hukum. Bahwa sudah tidak dipungkiri lagi, bahwa pembangunan merupakan proses yang kontinyu yang mengakibatkan perubahan ke arah yang lebih baik, terencana untuk mencapai tujuan juga dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan dan tingkat kondisi kemasyarakatan yang lebih baik di bidang sosial sebagaimana diinginkan (Kadri Husin: 2000; 1).

Selanjutnya hubungan pembangunan nasional dengan pembangunan hukum dapat diperjelas dengan skema berikut ini :



Skema di atas dapat diambil suatu pemahaman mengenal pembangunan hukum yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional, karena apabila dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memelihara pembangunari/kehidupan yang tertib, aman, add. Kepastian hukum ... lalu fintas kehidupan modern yang berjalan dengan tempo yang tinggi, sehingga hukum memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam lalu lintas kepentingan

yang kompleks sebagian masyarakat yang modern. Dengan adanya hukum, lalu lintas kehidupan bisa berjalan dengan lancar dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari atau dikurangi, hal ini akan dapat menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biaya masyarakat (social cost) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman, adil.

Apabila dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum dapat dikatakan bahwa hukum bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya :

- a. Perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dan dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi :

- a) Sarana kontrol social

- b) Sarana untuk melakukan "*social engineering*" atau rekayasa sosial (Kadri Husin: 2000: 4)

Pembangunan nasional yang dihubungkan dengan pembangunan hukum memang tidak dapat terpisahkan. Dan pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan eksese-eksese positif dan negatif, diantaranya yang menyebabkan eksese negatif akan adanya faktor kejahatan yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan nasional maupun pembangunan hukum itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jauh tentang kriminal itu sendiri, maka perlu dijelaskan mengenai kebijakan politik kriminal.

1. Pengertian Politik Kriminal

Adapun pengertian politik kriminal sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut "politik kriminal" yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Barda Nawawi Arief- 1996: 2).

Usaha penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan bahwa politik kriminal ialah "Pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat (Muladi & Barda Nawawi Arief. 1998:157).

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*," (Marc Ancel:1965: 209). Usaha yang rasional dari masyarakat itu sendiri sebagai kontrol terhadap kejahatan yang ada. Hal ini pula dilengkapi dengan pendapatnya Hoeffiagels, tentang politik kriminal yang dirumuskan dengan "*The science or responses, the science of crime prevention, a policy of designating human behavior as crime, and rational total of the responses to crime* (Hoeffiagels: 1973: 57, 99, 100).

Beberapa teori politik kriminal yang diuraikan di atas, maka Kadri Husin tidak menggunakan istilah politik kriminal, akan tetapi menggunakan istilah "kebijakan kriminal". Alasannya karena istilah politik kriminal lebih luas dari istilah kebijakan kriminal yang mempunyai makna lebih sempit, yaitu sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara rasional oleh lembaga atau aparaturnya secara terorganisir. Penanggulangan kejahatan itu sebaiknya tidak hanya dari sudut law enforcement saja, tetapi kebijakan rasional itu dalam pengertian yang lebih luas meliputi : proses formulasi, implementasi sampai kepada eksekusi, berarti terkait dengan peran lembaga legislatif, eksekutif, sistem peradilan dan masyarakat (Kadri Husin: 19-20-2000).

Pendapat tersebut didasari oleh pendapat Robert Meyer, bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga kebijakan kriminal menyebabkan terjadinya reorientasi terhadap hukum dalam menanggulangi, kejahatan dan reevaluasi terhadap beberapa hal, seperti:

- (1) Tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diberikan
- (2) Indikasi berhasil atau tidaknya, terdiri atas :
 - a. Sanksi yang diberikan
 - b. Pelaksanaan pembinaan atau pemasyarakatan

Penyebab adanya reorientasi dan maka jika mengacu pada pendapat Manuel Lopes Rey, seorang guru besar hukum pidana dan kriminologi Bolivia yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dapat dibenarkan bahwa "Sistem hukum pidana pada saat ini tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang, yaitu pada umumnya telah usang dan jelas tidak adil; dan bahwa secara keseluruhan hal itu merupakan faktor yang menunjang peningkatan kejahatan". Oleh karena itu menurut La Patra, Crime Policy dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan/*reducing crime*, baik dalam arti mampu melakukan pencegahan

kejahatan/*prevention of Crime* maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku kejahatan itu sendiri *rehabilitation of criminals* (Barda Nawawi Arief 1988: 4).

Sebagai demikian tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizens*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Dan lebih sederhana tujuan kebijakan kriminal adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Jika memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil makmur sejahtera lahir dan batin sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya.

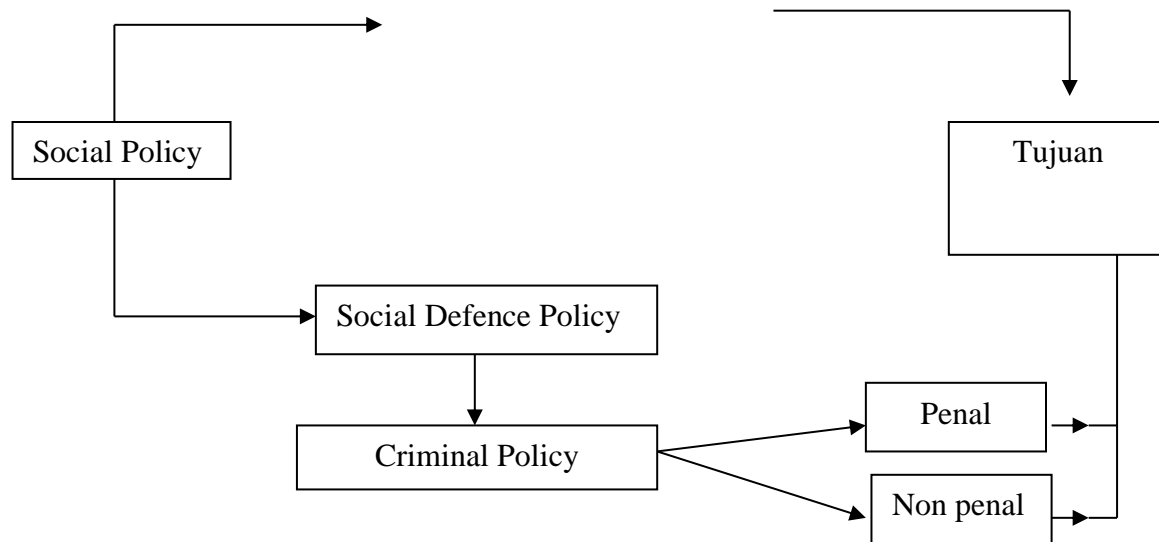
2. Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial

Berbicara mengenai *Criminal Policy* adalah bagian dari *Law Policy* dan bagian dari kebijakan sosial yang dikenal dengan *Social Policy*. Dan hubungan politik kriminal dan politik sosial adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :

Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" should be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like happiness of citizens", a wholesome and cultural living, social welfare or equality".

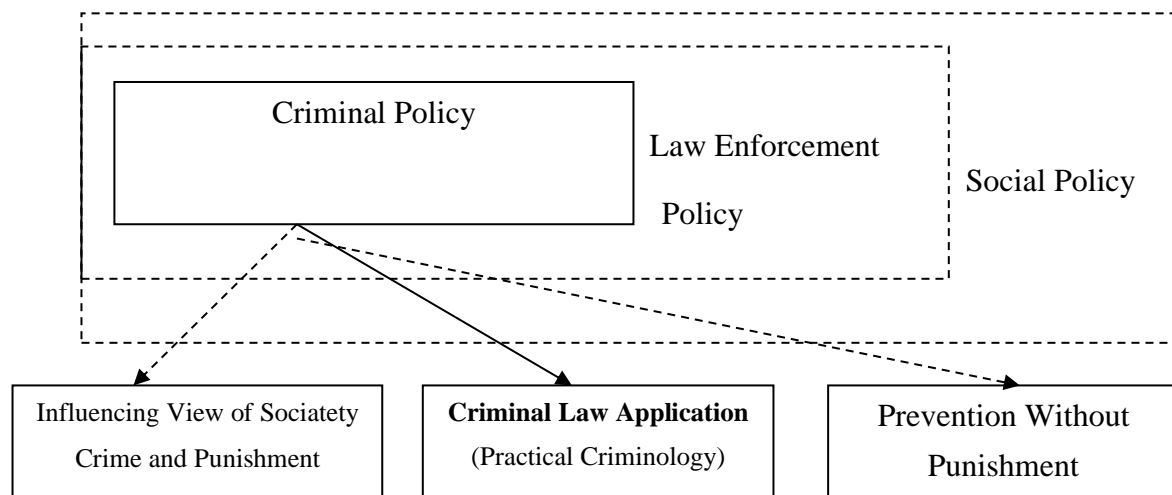
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis, hubungan antar keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Social Welfare Policy



Sehubungan dengan skema di atas (Barda Nawawi Arief 1996: 3). G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan sebagai berikut :

" *Criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy.... The legislative and enforcement policy is in term part of social policy,*" (G.P. Hoefnagels: 1969:56-57). Adapun skemanya sebagai berikut :



Dengan demikian dari dua skema di atas telah menggambarkan bahwa hubungan politik dengan politik sosial adalah sangat erat. Hal ini ditegaskan bahwa politik kriminal adalah bagian dari kebijakan hukum dan kaitannya dengan politik sosial adalah merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan akhirnya adalah untuk mencapai welfare atau kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan politik mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan kepala masyarakat untuk mencapai welfare tersebut.

3. Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan didasarkan pada dua skema diatas, Yaitu : social policy yang termasuk di dalamnya adalah social welfare policy, social deferance policy, dan criminal policy yang mempunyai tujuan akhir dalam penyelesaiannya dapat melalui sarana penal dan non- penal. Dan Marc Ancel mengatakan bahwa : " *Modern criminal scienci*" terdiri dari tiga komponen yaitu : *Criminology, Criminal Law dan Penal Policy* " (Marc Ancel : 1965: 4-5).

Sedangkan criminal policy yang termasuk didalamnya adalah kebijakan penegakan hukum, dan merupakan bagian dari social policy, maka dapat mempengaruhi pandangannya masyarakat terhadap kriminal Itu sendiri (*practical crimonology*); dan adanya pencegahan sebelum sampai pada satu sanksi hukum (*prevention without punishment*). Selanjutnya dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh:

1) Pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (Integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal (Barda Nawawi Arief 1996:4).

Pendekatan kebijakan pada point (b) adalah pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal. Hal ini merupakan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang "non penal".

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dan usaha-usaha non penal

itu adalah mempertebal kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sehubungan dengan ini, Radzinowics menyatakan : "*Criminal policy must combine the Varios preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole Into an organized system of activity*" (Karl O. Christiansen: 1974: 74). Pernyataan di atas memberi penekanan bahwa yang menjadi masalah utama adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dan dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan "Social defense planning" benar-benar dapat berhasil. juga diharapkan pula akan tercapainya hakekat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.

- c. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Muladi & Barda Nawawi Arief 1998:160)

Penentuan dua masalah di atas adalah tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, R. Cross dan P.A. Jones dalam *An Introduction To Criminal Law* berpendapat :

".... the criminal law may be used not only for the prevention of wrongs which are obviously deserving of punishment, but also for the achievement of the policy of the government of India" (R. Cross & P.A. Jones: 1953:3).

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila , sehubungan dengan ini maka (pengguna) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindak penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spirituil) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus, pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil (*cost-benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau *over blasting* (Sudarto; 1977: 44-48).

Pemahaman yang dapat di ambil yang berkenaan dengan kriminalitas di atas, maka dalam melaksanakan politik (kebijakan) tersebut harus diadakan dengan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan "hukum pidana" harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.

Oleh karena itu dalam memilih dan menetapkan (hukuman) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat

mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional. Kebijakan dalam menggunakan hukum pidana di atas juga perlu memperhatikan kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, sebagaimana dikemukakan oleh Bassiouni dalam bukunya *Substantive Criminal Law* (1978) yang dikutip kembali oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam teori-teori dan kebijakan hukum pidana, menyebutkan bahwa kepentingan sosial ialah:

- (1) Pemeliharaan tertib masyarakat,
- (2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan. Dasar tertentu mengenali keadilan, sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu (Muladi & Barda Nawawi Arief- 1998-166)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi kepada nilai. Disamping itu untuk di Indonesia perlu diperhatikan akan pendekatan humanistik. Artinya dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.

- 2) Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional).

Hal tersebut sebagaimana pendapat Sudarto bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional (Sudarto: 1981: 104).

Bertolak dari kebijakan integral di atas, bahwa penanggulangan kejahatan, politik sosial dan pembangunan nasional, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen. Oleh karena itu berdasarkan Laporan Kormisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan "crime trend and crime prevention strategies" antara lain menyatakan :

"....the correlation between development and increasing criminality could not be accepted as a principle, development was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies," (Sixth UN Congress, Report. 1981: 42).

Pernyataan di atas adanya korelasi atau hubungan antara pembangunan dan peningkatan kriminalitas. Hal itu disebabkan adanya nilai-nilai kultur, nilai moral tidak masuk dalam kesatuan strategi perlindungan sosial. Oleh karena itu dari pernyataan di atas, jelas terlihat suatu penegasan bahwa :

- (1) Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
- (2) Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu :
 - a) tidak direncanakan secara rasional;
 - b) perencanaannya timpang dan tidak seimbang,
 - c) mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
 - d) tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.
- 3) Dengan penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari segi politik kriminal. Oleh karena itu berdasarkan Kongres PBB ke-6 tahun 1980 Sangat memperhatikan masalah ini. Dalam pertimbangan resolusi mengenai "*Crime trends and crime prevention strategies*" antara lain dikemukakan :

- bahwa masalah kejahatan merintang, kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*the crime problem impedes progress towards the attainment of artacceptable quality of life for all people*);
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condinons giving rise to crime*);
- Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara telah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan dislaiminasi nasional, standar hidup yang rendah pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial dan national discrimination, low standard of living, unemployment and illmemcy among broad sections of the population*). (Dikutip dari Barda in Nawawi Arief- 1996: 11)

Beberapa pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa harus diambil tindakan-tindakan yang nyata untuk menghapus kondisi kehidupan yang menurunkan martabat manusia dan menyebabkan kejahatan, meliputi pengangguran, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial. Oleh karena itu kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan Upaya-upaya yang nyata untuk menghapuskan hal tersebut merupakan strategi pencegahan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*).

Pada Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba. Dalam dokurnen Kongres No. A/Conf 144/U17 tentang "*Social Aspects of Crime Prevention and Criminal justice In the Context of Development*" antara lain dinyatakan :

- Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebuta hurufan, kebodohan, peyakit, dan ketakutan akan peran serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat (Barda Nawawi Arief 1996: 12).

Adapun faktor lain yang menyebabkan adanya kejahatan, yaitu faktor kondusif, khususnya masalah "*urban crime*", antara lain :

- kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak, dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi,
- meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- mengendornya ikatan sosial dan keluarga; keadaan kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- rusaknya atau hancurnya identitas budaya asia yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berinteraksi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya
- penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media masa) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak) atau sikap-sikap intoleransi (Barda Nawawi Arief- 1996: 14)

Faktor kondusif yang menyebabkan urban crime, maka ada beberapa dimensi perkembangan kejahatan yang menjadi pokok perhatian pada Kongres ke-5 tahun 1975 di Geneva diantaranya "*Crime as business*", yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan

konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "*organized crime*", "*white collar crime*" dan korupsi.

Kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta korupsi mendapat perhatian yang serius pada Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Kuba. Penekanannya antara lain:

1. masalah *urban crime*;
2. *crime against the nature and the environment*,
3. *corruption*, keterkaitannya dengan *economic crime*, *organized crime*, *illicit trafficking in narcotic drugs and psichotropic substances*, termasuk juga masalah *money laundering*,
4. *crime against movable cultural property (cultur, heritage)*;
5. *computer related crime*,
6. *terrorism*;
7. *domestic violence*
8. *instrumental use children in criminal activities* (Barda Nawawi Arief- 1996:18)

Penekanan beberapa kejahatan seperti masalah perpindahan penduduk baik dari desa ke kota atau sebaliknya, juga perpindahan penduduk antara negara yang jahatan, juga masalah seperti kejahatan komputer, kegiatan teror, media yang dapat mendorong anak-anak untuk berbuat kejahatan.

Disamping itu masalah yang paling penting adalah "korupsi". Hal ini yang berkaitan kegiatan ekonomi, juga perdagangan narkotika, termasuk didalamnya masalah pencucian uang. Khusus mengenai masalah korupsi menjadi masalah yang paling serius, mengingat "*corrupt activities of public official*" itu berakibat:

- a) dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of govern programmes*)
- b) dapat mengganggu/menghambat pembangunan (*hinder development*);
- c) menimbulkan korban bagi individual maupun kelompok (*victimize individual and groups*).

Memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dari korupsi di atas yang dapat menghancurkan program pemerintah, menghambat pembangunan dan dapat menimbulkan kerugian. baik individu maupun kelompok atau merugikan keuangan negara. Oleh karena itu perlunya strategi anti korupsi menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Disamping itu perlunya memperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta perkembangan/kecenderungan

kejahatan (*crime trend*), seperti dikemukakan di atas, kebijakan integral juga berarti perlunya memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban harus juga dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti lain pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Dan dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya penanggulangan kejahatan, baik yang telah terjadi maupun pencegahan untuk kejahatan yang belum dilakukan.

B. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen

(a) Sistem peradilan pidana menjadi pusat perhatian kriminologi yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran. Masalah sentral yang menjadi pusat perhatian bukan lagi pada sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan sedang yang lain tidak, tetapi mengapa perbuatan seseorang ditetapkan sebagai suatu kejahatan sedangkan yang lain tidak.

Sehubungan dengan hal itu Clayton A. Hartjen mengatakan :

" The central quesnon Is not why some people break the law while others do not It is, rather, why some people's conduct is define as crime and the of others is not Is short, it is not the criminal character of behavior that is of interest to criminalizing behaviour. This concern requires that the attention of criminology shift from the violator of criminal law to criminal jutice system and the interrelationships between the perception of crime, the administration of criminal law, and society on general" (Clayton A. Hartjen: 1974:9)

Pernyataan Clayton A. Hartjen di atas, bahwa ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada sistem peradilan pidana ini tampaknya cukup serius. Bahwa sistem peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penganggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Kenyataannya bahwa kejahatan tetap, beterus meningkat, yang dapat dilihat

sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, disamping itu sistem peradilan pidana dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen.

Pada krisis sistem peradilan pidana tersebut masih berkembangnya *contra productivity*, yaitu timbulnya akibat-akibat yang berlawanan (dari yang diharapkan), antara lain peningkatan intervensi polisi malahan meningkatkan kejahatan yang tersembunyi dan usaha mengintensifkan pengejaran penjahat mengundang timbulnya strategi kontra yang bersifat mafia dan (*consequences*) inilah yang pada akhirnya menyebabkan sistem peradilan itu sendiri menjadi suatu *social problem* (Stephan Quensel: 1988:3).

(b) Masalah Perundang-undangan Sebagai Bagian dari Masalah Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana pada akhirnya merupakan proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*In concreto*".

Dengan sembilan sistem peradilan pidana tidak hanya dapat menjadi masalah sosial, tetapi juga menjadi faktor kriminogen. Hal ini Jika dilihat dari seberapa jauh kebijakan perundang-undangan, khususnya kebijakan perundang-undangan hukum pidana substantif, sebagai faktor kriminogen.

(c) Kebijakan Perundang-undangan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen

1. Kebijakan legislatif secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penganggulangan kejahatan, hal ini dituangkan dalam perundang-undangan, meliputi :
 - a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
 - b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu dan sistem penerapannya;
 - c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.
2. Kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajarlah apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan

kriminal (*criminal/crime policy*). Dan apabila ternyata kejahatan tidak berkurang tetapi malah meningkat, maka hal ini dapat dilihat sebagai suatu petunjuk atau indikator tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada.

3. Kebijakan perundang-undangan yang sering menjadi sorotan ialah kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan atau sering disebut kebijakan kriminalisasi. Dan Undang-Undang memberikan kewenangan dan dasar legitimasi kepada penegak hukum untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang merupakan kejahatan atau tidak. Dalam batas demikian, maka sebenarnya tidaklah dapat dikatakan bahwa "Undang-Undang merupakan faktor kriminogen". Artinya Undang-Undang bukan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, tetapi hanya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perbuatan seseorang dinyatakan atau dicap sebagai kejahatan (Muladi & Barda Nawawi Arief 1998:201).

Pernyataan di atas, bahwa faktor Undang-Undang sebagai salah satu penyebab adanya kejahatan, hal demikian memang ada benarnya jika kebijakan perundang-undangan yang tidak direncanakan secara rasional dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan dan meningkatnya kejahatan.

Persoalan di atas dapat ditunjukkan dengan kondisi KUHP itu sendiri. Diantaranya sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu landasan yang rasional. Hal inilah yang merupakan salah satu pendukung utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding (Lihat John Kaplan: 1973:443).

Pendapat John Kaplan di atas mengenai KUHP tidak terencana dengan baik dan tanpa landasan rasional akan menyebabkan disparitas pidana. Akibat dari disparitas pidana tersebut ialah : (a) dapat memelihara timbulnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada; (b) gagal mencegah terjadinya tindak pidana; (c) mendorong aktivitas (meningkatnya) kejahatan; dan (d) menintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Melihat uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat hubungan antara ketidakrasionalan perundang-undangan (dalam sistem pidanaannya) dengan adanya disparitas pidana dan meningkatnya aktivitas kejahatan. Terjadinya disparitas pidana yang mencolok dan sedang mendapat sorotan tajam di beberapa *mass media* saat inipun nampaknya tidak dapat dilepaskan

dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, Undang-Undang dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya disparitas pembedaan.

Apabila hal ini berakibat pada timbulnya sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka Undang-Undang yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana itupun dapat dikatakan menjadi sumber tidak langsung timbulnya tindak pidana lain. Dengan perkataan lain, dapat menjadi faktor kriminogen.

C. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ekonomi

Sebelum menjelaskan fungsionalisasi hukum pidana dimaksud alangkah baiknya mengetahui sepintas tentang kategori *economic crimes* atau *causes of economic power* ialah "korupsi, pelanggaran pajak delik-delik lingkungan, penipuan, penggelapan, penyuapan, kejahatan di bidang perkreditan, kejahatan di bidang ketenagakerjaan, dan penyalahgunaan/kejahatan oleh korporasi" (Barda Nawawi Arief- 1990:7).

Mengamati pendapat di atas, maka ada yang mengelompokkan pendapat kejahatan ekonomi menjadi tiga, yakni :

- (1) *Property Crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara;
- (2) *Regulatory Crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah;
- (3) *Tax Crimes*, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan laporan menurut Undang-Undang Pajak.

Dengan kategori yang dikemukakan di atas, maka sudah seharusnya memfungsionalisasikan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan ekonomi. Fungsionalisasi hukum pidana, dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret Hal itu identik dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan penegakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief- 1990:157).

Berdasarkan pengertian mengenal fungsionalisasi hukum pidana maka dalam proses penegakan hukum pada umumnya tidak terlepas pada tiga faktor terkait yakni : (1) faktor

perundang-undangan; (2) faktor aparat/badan penegak hukum (seperti : polisi, jaksa, hakim, dan LP); (3) faktor kesadaran hukum.

Proses penegakan hukum dalam bidang ekonomi perlu diikuti oleh kebijakan legislatif yang merupakan tahapan paling strategis untuk penanggulangan kejahatan ekonomi dengan memformulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahapan-tahapan fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi.

Beberapa tahapan tersebut diatas, maka perencanaan atau kebijakan penegakan hukum dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, secara garis besar meliputi :

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu dan sistem peneranannya;
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah masalah fungsionalisasi hukum pidana khususnya dibidang kebijakan aplikatif, adalah peranan badan/aparat penegak hukum. Mengingat sifat atau ciri dari kejahatan ekonomi yang lebih merupakan *white collar crime* dan *organized crime*, yang pelakunya sangat sulit di jangkau oleh hukum.

Kesulitan untuk mengungkapkan kejahatan ekonomi, karena aparat penegak hukum tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi karena dua hal, yaitu Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku tindak pidana ekonomi, keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.

Menghadapi dua masalah tersebut di atas, maka aparat penegak hukum hendaknya dapat meningkatkan kemampuan baik kemampuan secara personal maupun kemampuan institusional.

Dengan demikian kejahatan ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang erat kaitannya dengan sistem atau struktur sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia internasional. Dan fungsionalisasi hukum pidana harus memperhatikan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang

hendak dicapai. Adapun pengaruh globalisasi ekonomi dan keterkaitan dengan tata ekonomi internasional, menjadikan stimulan untuk mengoptimalisasikan berfungsinya hukum pidana.

D. Pengertian Korupsi

1. Pengertian Korupsi Menurut Bahasa dan Istilah

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*corruptus*", "*Corruption/corrupt*" (Inggris); "*Corruption*" (Perancis); "*Corruptie*" (Belanda) dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Adapun pengertian korupsi. adalah: jahat, busuk, mudah disuap" (Bambang Riyadi: 1988: 41).

Pengertian lain dari korupsi adalah "kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau ungkapan yang menghina atau memfitnah" (Hamzah: 1988: 7).

Adanya kesamaan pengertian di atas, seperti kebusukan, ketidakjujuran dan dapat disuap tentang arti korupsi. Sedangkan pengertian korupsi di Malaysia disebut "kerakusan" yang berasal dari bahasa Arab "resuah". Dan korupsi juga diartikan sebagai tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya yang sah, dalam bahasa Arab disebut "As Sariq" yang berubah menjadi "Sarmadun" : amat kuat mencuri, atau istilah lain disebut dengan sarmadun yang artinya "kekal dalam melakukan pencurian" (Muhammad Idris Al Marbawi: tt. 284).

Selanjutnya pengertian masyarakat umum terhadap kata "korupsi" adalah berkenaan dengan ketiangan negara yang dimiliki secara tidak sah (Leden Marpaung 1992: 149). Lebih jelas kata korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jika dipahami dengan seksama, ada tiga tipe fenomena korupsi yang tercakup dalam pengertian dan istilah korupsi, seperti penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

2. Ciri-ciri Korupsi

Ciri-ciri korupsi yakni sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan;

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tataan masyarakat dan didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus (Syed Hussein Alatas: 1983: 14)

3. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi

Tindak kejahatan korupsi memiliki ciri yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan korupsi identik dengan status sosial dan jabatan seseorang. Perbedaan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan-kejahatan lainnya terletak pada tingkat sosial ekonomi atau pendidikan pribadi pelaku-pelakunya (Amir Muhsin: 1988: 17)

Melihat pernyataan tersebut di atas maka dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa tindak kejahatan korupsi merupakan kejahatan-kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai status sosial yang cukup tinggi, dalam suatu masyarakat, dan tentunya sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan tersebut juga berbeda dari kejahatan pada umumnya. Oleh karenanya, menurut Andi Hamzah, yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan korupsi, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor Inti merupakan yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.

2. Latar belakang kebudayaan atau Kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUH Pidana di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek Van Strafrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan pasal 423 dan pasal 425 dalam, KUH Pidana Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.
4. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan Pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah (Andi Hamzah : 1982:46).

Pendapat di atas, nampaknya Jika dihubungkan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang yang mana dalam pembangunan disegala sektor dan kondisi sistem pemerintahan yang berlaku ada benarnya. Akan tetapi pernyataan tersebut di atas, banyak pihak yang menyangkal dan kurang setuju dengan pendapat tersebut. Karena segala bentuk kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh faktor mental pelakunya dalam arti seseorang yang sehat mentalnya tidak akan mudah untuk melakukannya sesuatu yang tercela. "Yang terpenting dan terutama adalah faktor mental, yaitu bahwa faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi.

Sekalipun faktor-faktor lainnya itu ada/pendapat pada diri seseorang, akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi (semacam ada rem)"(Andi Hamzah : 1988: 46).

Menurut pendapat yang kedua tersebut di atas bahwa faktor mental merupakan lebih dominan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan korupsi, artinya seseorang yang tingkat keimanannya atau ketaqwaannya rendah akan sangat berpeluang melakukan kejahatan korupsi. Akan tetapi seseorang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang mantap, atau seseorang yang

berjiwa/mentalnya sehat tidak akan mudah terpengaruh oleh suatu yang membawa kepada perbuatan yang tercela dan merugikan orang lain. Sedangkan yang menjadi ukuran bagi seseorang yang bermental sehat adalah :

1. Orang itu tidak terlampau terpengaruh oleh unsur-unsur emosional dan dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.
2. Dia merasakan dan menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dan dia mempunyai rasa tanggung jawab ("*tepa salira*")
3. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (spritual). Dia mampu memuaskan tujuan hidup atas dasar kenyataan dan merasa puas apabila dapat berprestasi demi kepentingan sernua (Soerjono Soekanto: 1979:31)

Penegasan di atas, nampak sangat beralasan bahwa faktor mental merupakan penentuan baik buruknya prilaku seseorang. Karena seseorang yang memiliki mental tentunya tidak mudah terpengaruh oleh unsur-unsur emosional dan cenderung bersikap menerima keadaan dirinya serta memiliki tanggung jawab moral. Dan biasanya orang semacam ini selalu di warnai oleh kehidupan spritual yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa kejahatan korupsi bersumber dari masyarakat dan masyarakat memberikan peluang untuk itu, sehingga implikasi dari semua itu, masyarakatlah yang akhirnya menanggung segala akibatnya. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terbentuknya prilaku seseorang dikemudian hari, lingkungan yang buruk akan menghantarkan seseorang berperilaku buruk dan begitu sebaliknya.

Kejahatan itu bersumber dimasyarakat, masyarakat memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah masyarakat. Untuk Melihat apa sebabnya seseorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertama-tama keadaan masa lampaunya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang-orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu, tetapi seseorang yang pada masa lampaunya telah melakukan kejahatan kenakalan anak-anak belum tentu masa dewasanya menjadi penjahat, mungkin ia menjadi seorang yang baik (Momon Marta Saputra : 1969: 106-107).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang sangat tercela dan buruk dan merupakan penyakit masyarakat yang akibatnya dapat mempengaruhi kewibawaan pemerintah. Korupsi sebagai suatu tindakan kejahatan yang sangat tercela, disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan; kejahatan tersebut, karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, latar belakang kultural, manajemen yang kurang baik dan lemahnya kontrol, modernisasi yang mempengaruhi perubahan nilai dasar atas masyarakat dan disebabkan oleh rusaknya mental seseorang yang mengakibatkan berperilaku buruk dan rakus, sehingga perilakunya cenderung dipengaruhi oleh unsur-unsur emosional yang mengajak berbuat kejahatan. Dan juga. faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang bermental jahat atau keberadaan masa lampaunya namun faktor ini tidaklah dominan karena seseorang yang masa lampaunya jahat tidak berarti ia akan jahat untuk selamanya.

Bahwa kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewaris, akan tetapi karena dipelajari dalam pergaulannya di masyarakat, sedang pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, seperti keadaan ekonomi maupun kebudayaan " (Amir Husen : 1986: 393)

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kondisi sosial dimana seseorang tersebut melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya akan tetapi dari berbagai faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan korupsi tersebut di atas terjadi penulis cenderung sependapat dengan karena alasan mental. Karena mental merupakan faktor yang sangat dominan menentukan bagaimana seseorang berperilaku baik maupun buruk, mental yang sehat mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan spritual dengan baik dan mental yang rusak akan mewarnai seseorang berperilaku buruk dan serakah sehingga hidupnya akan selalu di jejal oleh ambisi-ambisi dan nafsu duniawi dengan menghalalkan segala cara.

4. Akibat Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai suatu kejahatan yang amat besar dapat menimbulkan akibat yang besar pula, baik akibat itu terhadap keuangan negara maupun perekonomian secara umum yang pada gilirannya akan menentukan dan mempengaruhi masa depan perekonomian suatu negara.

Adapun Akibat tindak pidana korupsi antara lain :

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenal kurang tumbuhnya perasaan nasional
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah juga karena turunnya martabat pemerintah tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi agar dengan demikian mendapat uang suap. Disamping itu, pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan.

5. Pengaruh Tindak Pidana Korupsi

a. Dari Segi Politik

Suatu pemerintah yang dipegang oleh para pejabat yang korup dan bermental rakus, berimplikasi pada hilangnya wibawa pemerintah di mata rakyat dan hilangnya kepercayaan dunia luar terhadap pemerintah tersebut. Oleh karenanya akibat politis yang diterima oleh suatu pemerintahan yang bermental korup para penguasanya, sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan negara-negara lain, terutama dalam hal pemberian bantuan. Hilangnya kepercayaan pemerintah di mata rakyat, mengakibatkan yang ada, sehingga stabilitas politik akan selalu kacau.

Suatu pemerintahan dimana pejabat-pejabatnya hanya korup akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan tersebut suatu negara yang memberikan bantuan ekonomi kepada negara yang pejabat-pejabatnya banyak yang korup sehingga bantuan negara yang memberikan bantuan tadi bisa menyebabkan pemberian bantuan selanjutnya akan terhambat, yang pembangunan ekonomi nasional menjadi macet dan tertantar sehingga mengganggu stabilitas perekonomian negara disamping mengganggu stabilitas politik (Amir Muhstin: 1988 34)

Merosotnya wibawa pemerintah di mata masyarakat, situasi yang demikian ini akan dapat dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik atau pihak ketiga lain yang bertanggungjawab untuk merongrong kewibawaan pemerintah.

b. Dari Segi Ekonomi

Keberadaan ekonomi suatu bangsa merupakan faktor penentu kesejahteraan bangsa itu sendiri, dan suatu bangsa akan sejahtera manakala suatu pemerintahannya di pegang oleh pejabat-pejabat yang bermental sehat dan tidak korup. Salah satu pendapat negara diperoleh antara lain dari sektor pungutan bea masuk bea keluar serta penerimaan pajak, dua faktor pendapatan ini digunakan untuk menunjang pembangunan dan pembinaan bangsa jika kedua faktor pendapatan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pejabat yang berwenang dan tidak terselamatkan, maka penerimaan kas negara akan berkurang karena sebagian besar pendapatannya diselewengkan oleh para oknum yang korup dan hal itu akan mempengaruhi perekonomian bangsa.

Pendapatan negara akan berkurang apabila pungutan bea masuk dan bea keluar dan penerimaan pajak tidak dapat diselamatkan karena adanya penyelundupan penyelewengan pajak-pajak negara oleh oknum-oknum pada kedua sektor tersebut. Penyelewengan tersebut dapat terjadi karena adanya korupsi. Khusus dalam penyelundupan *import* karena adanya korupsi tersebut disamping hilangnya sebagian bea masuk yang seharusnya masuk ke dalam kas negara juga barang *Import* tersebut dapat memukul produksi dalam negeri karena film tidak diawasi secara ketat barang import tersebut secara relatif dapat lebih murah dibandingkan dengan barang produksi dalam negeri (Amir Muhsin : 1988: 37)

c. Dan segi HAMKAMNAS

Keamanan dan ketahanan nasional suatu bangsa akan menjadi rapuh jika masyarakat Indonesia mudah disuap, karena bagaimana telah diuraikan bahwa korupsi dapat berarti jahat, busuk, mudah disuap, dan penyuapan ini merupakan penyakit yang menggejala masyarakat, dan masyarakat suatu bangsa yang mudah disuap, berarti loyalitas bangsa itu akan mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan negaranya akan berkurang. Sehingga kekuatan asing yang hendak mendominir atau memaksa ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

"Perasaan Nasionalisme akan menjadi berkurang yang menimbulkan peluang-peluang bagi subversi Komunis ataupun subversi lain di Indonesia" (Bambang Riyadi : 1988: 404).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketahanan nasional akan menjadi rapuh manakala masyarakat Indonesia, terutama para pejabat yang memiliki peran dalam suatu pemerintah

memiliki mental yang rusak dan mudah disuap. Karena itu akan di manfaatkan oleh kekuatan asing untuk mendominasi berbagai kebijakan nasional untuk kepentingannya.

d. Dari Segi Mental

Tindak kejahatan korupsi merupakan pencerminan mental seseorang, dan korupsi itu sendiri dapat merusak mental pejabat pemerintah, karena seseorang pejabat yang dirasuki oleh sikap korup maka segala sesuatu akan dilihat dari kaca mata materi saja sehingga lupa akan tugasnya sebagai pejabat pemerintah.

"Pejabat-pejabat yang bermental korupsi berfikir dalam hatinya mengenai apa yang bisa diambil dari negara dan bangsa ini" (Ali Chidir. 1979-19).

Sesuatu yang sangat berbahaya lagi adalah jika sampai generasi muda bangsa ini mencontoh sifat korupsi yang berjangkit dalam masyarakat kita sekarang ini, maka akan sangat mempengaruhi mental-mental generasi muda dikemudian hari, karena dianggapnya korupsi suatu langkah yang dapat membawa dengan cepat seseorang menjadi kaya.

e. Dari Segi Hukum

Penegakan hukum secara adil akan sulit dicapai apabila para penegak hukumnya bermental rendah dan hanya mementingkan kepuasan materi. Dari kejadian-kejadian selama ini jelaslah bahwa sebagian besar para penegak hukum sudah bermental korupsi sehingga menurunkan wibawa sebagai penegak hukum. Hukum dan keadilan telah dapat diombang-ambingkan oleh uang sehingga berubah menurut selera si penyuap lalu timbul kepincangan-kepincangan dan keanehan-keanehan penegak hukum dalam masyarakat.

Tidak mengherankan bahwa timbul suara-suara sumbang dalam masyarakat yang mengatakan orang kaya atau pejabat kebal terhadap hukum. Keadilan dapat dibelokkan sesuai dengan seleranya sepanjang para penegak hukum tersebut masih dapat disuap.

"Seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan tetap bahagia dan tertawa sepanjang para penegak hukum masih dapat disuap dan hukum dapat dilumpuhkan dengan kekuatan uangnya" (Ali Chidir. 1979: 406).

Fakta-fakta korupsi sebagaimana digambarkan di atas menyebabkan supremasi hukum dan pembinaan hukum di Indonesia akan terhambat. Mental dan karakter para pejabat penegak hukum merupakan faktor utama bagi pembinaan hukum di negara tercinta ini dan sebagai sarana untuk mengantarkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Cita-cita akan terwujudnya tertib hukum tidak akan dapat tercapai jika korupsi merajalela di kalangan penegak hukum, sehingga hukum tidak dapat ditegakkan terhadap penyelewengan-penyelewengan atau pelaku-pelaku yang merongrong ketertiban hukum itu.

E. Beberapa Penuturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" sebagai berikut :

1. Delik-Delik Korupsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Latar Belakang

Berdasarkan KUHP, pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dapat disetarakan dengan delik penyuapan yang tertuang dalam Bab XXVIII Buku II khususnya pasal 209, 210, 220, 231, 387, 388, 415-423, 425, 435 dan 430. Istilah yang dipergunakan juga memang tidak secara jelas menyatakan sebagai tindak korupsi namun mengarah pada perbuatan tercela sebagaimana tejemahan Mulyanto sebagai "pemerasan", "kerakusan", dan "kejahatan pada waktu melaksanakan jabatannya" yang nampak merupakan tuntutan langsung dari Ned. W. v.S.

b. Penjelasan umum dan Pengertian Pokok:

Termasuk dalam pengertian korupsi adalah penerimaan suap oleh pegawai negeri atau lazim disebut "*actieve omkopine*".

c. Hal-hal khusus yang diatur:

1. Hukum yang dijatuhkan bervariasi untuk masing-masing jenis tindak pidana tersebut.
2. Delik Korupsi merupakan kejahatan biasa, artinya bukan kejahatan dengan atau pelanggaran.
3. Delik korupsi dibedakan antara korupsi yang merupakan delik jabatan dan korupsi yang ada kaitannya dengan jabatan

2. Delik-Delik Korupsi Dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Pert/Perpu/013/1958)

a. Latar Belakang

Perpu ini disusun agar supaya dapat membongkar dan menanggulangi secara tegas dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segala motif kejahatan korupsi yang semakin meluas.

b. Penjelasan Umum dan Pengertian Pokok:

Perpu/013/1958 ini berazaskan hukum ekseptional dan temporair yaitu hukum masyarakat yakni agar dapat menanggulangi kejahatan secara tegas dalam waktu singkat. Peraturan ini membedakan dua jenis perbuatan korupsi :

1. Perbuatan pidana, korupsi dikaitkan dengan unsur kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Perbuatan korupsi lainnya yang dapat dikenal keputusan dirampas (beslag) perdata, tindakan fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada Negara secara paksa, serta tindakan penyelidikan kekayaan uang di bank.

c. Hal-hal khusus yang diatur

selain pengambil alih rumusan KUHP, Peperpu ini dengan tegas menentukan sasaran perampasan harta benda hasil perbuatan korupsi tercela (bukan perbuatan pidana korupsi) meliputi :

Harta benda seseorang atau suatu badan yang tidak dapat diterangkan asal - usulnya secara sah, harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya, harta benda seseorang yang kekayaannya dianggap tidak seimbang dengan penghasilan dari mata pencaharian (pasal 12 ayat 2) Peperpu ini juga dapat memaksa Bank untuk mempersiapkan catatan keuangan seseorang tersangka.

3. Delik-Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960.

a. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peperpu 013/1958 dengan azas "hukum ekseptional" dan azas "hukum dibentuk bersifat temporair" sangat disayangkan tidak dapat dijalankan sepenuhnya untuk menanggulangi timbulnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu mulai dirasakan perlu adanya perubahan terhadap Peperpu ini. Pengadaan hukum atau tindakan luar biasa yang bersifat hukum ekseptional (Hukum Penyimpangan) yang terungkap dalam Peperpu ini dengan pembaharuan di bidang hukum acara pidana dan perubahan formulasi delik korupsi, maka Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 Peperpu 013/1958 secara resmi dicabut meskipun isi pasal-pasal nya sebagian besar masih sama dengan Peperpu dengan perubahan misalnya "perbuatan" diganti dengan "tindakan", dll.

b. Penjelasan Umum dan Pengertian Pokok:

Pembuatan pidana korupsi (tindak pidana korupsi) merupakan perbuatan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain dan seterusnya,

c. Hal-hal khusus yang diatur :

1. Setiap tersangka wajib memberikan keterangan mengetahui harta benda yang dimilikinya, atau keluarganya, atau suatu badan yang diurusnya, dan apabila keterangannya tidak benar akan dituntut dan dipidana tersendiri.
2. Hakim mewajibkan tersangka untuk menjawab pemeriksaan dan dapat mewajibkan mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang benar, dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dituntut dan dipidana tersendiri.
3. Setiap saksi atau ahli wajib memberikan keterangan atau surat-surat yang bersangkutan dengan perkara, kecuali petugas agama dan dokter, dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dituntut dan dipidana tersendiri.
4. Pemeriksaan terhadap salah satu ahli yang ada hubungannya dengan rahasia jabatan atau kedudukan atau bank, dapat dilakukan pemeriksaan dengan pintu tertutup.
5. Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telegram dan telepon, serta dapat mernasuki tempat atau rumah untuk menjalankan tugasnya sekalipun ada penolakan dari penghuninya, atau tanpa ijin lebih dahulu dari

pengadilan. Khusus untuk membuka rahasia bank wajib memperoleh ijin dari Kepala jawatan Pajak, Jaksa Agung atau 10 Mahkarnah Agung.

6. Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mendeponir perkara berdasarkan kepentingan tertentu, dan jaksa berwenang memeriksa simpanan uang tersangka di bank dengan menyesuaikan peraturan rahasia bank.
7. Beban pembuktian merupakan pembuktian ganda, maksudnya perbuatan korupsi harus dapat dibuktikan adanya suatu pelanggaran atau kejahatan apakah terlebih dahulu, kemudian baru dibuktikan apakah perbuatan itu ada unsur memperkaya ... atau menguntungkan

4. Delik-Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disahkan pada tanggal 29 Maret 1971 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, memuat beberapa ketentuan baru sebagai penyempumaan dan/atau perubahan terhadap peraturan lama meliputi bidang hukum pidana material dan hukum pidana formal. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas peraturan perundangan yang bersifat khusus yang diperlukan oleh para penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan korupsi secara represif dan efektif.

b. Penjelasan Umum dan Pengertian Pokok:

Delik Korupsi meliputi perbuatan : (pasal. I ayat a-e)

- (a) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan langsung / tidak langsung, diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.
- (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.
- (c) Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan bangunan, penggelapan atau pemerasan dikaitkan dengan jabatan.
- (d) Pemberian hadiah atau janji, kepada seorang pegawai negeri disebabkan oleh kewenangan dan jabatannya yang melekat dengan rumusan pasal demikian ini maka

nampak unsur delik korupsi tidak harus diketahui oleh perbuatan pidana atau pelanggaran, asal saja memiliki unsur melawan hukum, memperkaya diri, langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara, sebagaimana dianut oleh Undang-Undang sebelumnya.

- (e) Tidak melakukan pelaporan bilamana menerima pemberian/ janji-janji, tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar berkaitan dengan kewenangan dan jabatannya.

c. Hal-hal Khusus yang diatur:

1. Pasal 2 Undang-Undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri yang semula diatur dalam pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1961, sehingga pengertian pegawai negeri meliputi juga orang-orang yang menerima gaji upah dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran lain dari negara atau masyarakat.
2. Pemeriksaan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (pasal 4)
3. Percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan pidana, korupsi, dipandang sebagai delik selesai atau delik "sui generis" (pasal I ayat I sub e).
4. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan keluarga dan setiap orang serta, badan hukum yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (pasal 6).
5. Hakim dapat memperkenankan terdakwa, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi, tanpa mengurangi, kewajiban jaksa memberikan pembuktian kesalahan terdakwa (pasal 17).
6. Apabila tidak berhasil memberikan keterangan yang memuaskan dalam sidang pengadilan tentang sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana korupsi.

7. Kecuali beberapa anggota keluarga dekat setiap orang wajib memberikan keterangan saksi atau ahli, dan kecuali petugas agama wajib memberikan keterangan sebagai saksi sekalipun mereka itu menurut ketentuan hukum yang berlaku wajib merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat, jabatan, dan kedudukannya (pasal 7 dan 8).
8. Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya ternyata tidak hadir dalam sidang tanpa memberikan alasan yang sah, maka ia dapat diputus dalam pemeriksaan di luar kehadirannya (pasal 23 ayat I sampai ayat 4). Dengan ketentuan ini maka Undang-Undang ini memungkinkan penjatuhan pidana secara inabsentia.
9. Apabila diperlukan bank wajib memberi keterangan mengenai keadaan keuangan/ surat berharga.
10. Pada prinsipnya dianut proses perkara yang justisiabel bukan militer diajukan ke pengadilan umum, sedangkan yang justisiabel militer diajukan ke pengadilan militer, kecuali apabila diperlukan koneksitas pada perkara Korupsi yang diadili dipengadilan negeri dengan hakim-hakim dari peradilan umum dan peradilan militer, atau dalam hal koneksitas pada perkara Korupsi yang diadili di pengadilan militer dengan hakim - hakim dari peradilan militer dan peradilan umum (pasal 24-25).
11. Pengusutan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh orang militer maupun yang bukan militer dipimpin dan dikoordinasikan oleh jaksa agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi (pasal 26).
12. Ancaman hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini adalah : hukuman penjara seumur hidup, atau penjara, selama-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah (pasal 28).
13. Ancaman hukuman pidana bagi barang siapa yang secara sengaja menghalangi, mempersulit, baik secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap terdakwa perkara korupsi maupun aksinya diancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

14. Perlindungan atas hak milik/ barang yang bukan kepunyaan terhukum dengan melihat hak dan itikad baik pihak ke-tiga (pasal 35).

15. Perluasan hukuman tambahan tentang perampasan terhadap barang yang diatur dalam pasal 39 KUHP, sehingga dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan ketentuan perampasan barang-barang tetap dan tidak tetap, berwujud dan tidak berwujud, perusahaan dan benda lain yang menjadi pengganti benda yang diperoleh dari hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Korupsi (pasal 34).

5. Delik-Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

a. Latar Belakang

Undang-Undang ini ditetapkan tanggal 19 Mei 1999 dan berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkan. Oleh karena, diundangkan pada 19 Mei 1999 maka praktis Undang-Undang ini belum efektif berlakunya (baru akan berlaku 19 10 November 1999 nanti). Undang-Undang ini disusun dalam kerangka tuntunan revormasi masyarakat dan pentingnya diwujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Selain itu tindak pidana korupsi disadari dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan adanya landasan hukum untuk pencegahannya.

b. Penjelasan Umum dan Pengertian Pokok:

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (pasal I in ayat 2).

c. Hal-hal Khusus yang diatur:

1. Tentang ruang lingkup mereka yang dapat dikenakan peraturan:

Penyelenggara negara, meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 1 ayat 2).

Penjelasan pasal ini menegaskan :

Pejabat lain juga termasuk mereka adalah Direksi, komisaris, pejabat struktural lain pada. BUMN dan BUMD, Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan kesehatan Perbankan Nasional, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, Militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pemimpin dan bendaharawan proyek.

2. Tentang kewenangan lembaga yang menangani kasus korupsi :
 - (a) Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa (pasal 10).
 - (b) Hasil pemeriksaan yang menunjukkan dugaan, kasusnya dilimpahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (pasal 18 dan penjelasannya).
3. Tentang sanksi hukum
 - (a) Sanksi Umum, berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 20 ayat 1) dan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 20 ayat 2)
 - (b) Sanksi Khusus, berupa Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta Rupiah dan paling banyak I Milyar Rupiah terhadap pelaku kolusi dan Pidana, penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta Rupiah dan paling banyak I Milyar Rupiah bagi pelaku nepotisme.
4. Masyarakat diharapkan berperan serta mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan memperoleh upaya perlindungan hukum dalam penyelenggaraan negara yang bersih.
6. Delik-Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
 - a. Latar Belakang

Undang-undang ini disahkan tanggal 16 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 387 sebagai tindak lanjut dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Selain dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan

keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, pencabutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 lebih didasari oleh kritikan bahwa :

1. Undang-Undang ini disusun dalam waktu relatif singkat menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menurut percepatan pelaksanaan penanganannya, disatu sisi pada prakteknya justru kondisi ini mengurangi seperlunya hak-hak azasi pribadi seorang terpidana atau tertuduh tindak pidana korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat

b. Penjelasan Umum dan Pengertian Politik:

1. Pelaku tindak pidana korupsi juga dimungkinkan secara korporasi, yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal I ayat 1).
2. Untuk mengantisipasi modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian yang semakin canggih dan rumit, maka rumusan tindak pidana korupsi juga meliputi perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dari penjelasan demikian ini maka pengertian melawan hukum dalam pidana korupsi juga mencakup perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. (Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

c. Hal-hal Khusus yang diatur:

1. Undang-Undang ini mulai menggunakan tata bahasa baku, yaitu setiap rumusan pasalnya dimulai dengan "setiap orang"... tidak lagi "barang siapa" seperti peraturan perundangan yang selama ini ada.
2. Perluasan penyebutan kategori Pegawai Negeri, sehingga juga meliputi rumusan KUHP, rumusan Undang-Undang Pokok kepegawaian yang baru, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara dan daerah dan orang yang menerima upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat

3. Ancaman hukuman pelaku pidana, korupsi (pasal 2): Pidana penjara seumur hidup, pidana, penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikitnya Rp. antara 200.000.000,00 paling banyak 1.000.000.000,00.
4. Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana (pasal 4). Meskipun demikian pengembalian ini dapat salah satu pertimbangan bagi hakim meringankan hukumannya (penjelasan pasal 4).
5. Pemberatan penjatuhan pidana dalam ketentuan yang sama dalam rumusan KUHP (pasal 209, 210, 387, 416-418 dll) baik dalam lamitatif waktu maupun denda antara Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000. Dengan demikian Undang-Undang ini mencantumkan pidana berupa pemberatan dengan minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati serta pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan uang pengganti kerugian negara.
6. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang sama korupsi dipidana dengan ancaman hukum yang sama dengan perbuatan yang sesungguhnya (pasal 15). Hal ini berarti merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantu tindak pidana pada umumnya dikurang, 1/3 (satu per tiga) dan ancaman pidananya (penjelasan pasal 15).
7. Memperluas pidana tambahan selain KUHP, dengan perampasan harta kekayaan berwujud/ tidak berwujud atau bergerak/ tidak bergerak dan perusahaan milik terpidana dan barang penggantinya dan pembayaran uang diperoleh dari Korupsi (pasal 18 ayat a dan b).
8. Dimungkinkannya penjatuhan pidana terhadap korporasi dan atau pengurusnya bila, perbuatan korupsi itu dilakulan atau atas nama suatu korporasi (pasal 20 ayat 1).
9. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam pidana korupsi didahulukan dari perkara lain. (pasal 25).
10. Terhadap tindak pidana, korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi jaksa Agung (pasal 27).

11. Hak bagi penyidik untuk membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman Pos, Telekomunikasi atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.
12. Dilaksanakannya gugatan secara perdata melalui jaksa Pengacara Negara bilamana tidak terdapat cukup bukti terjadinya pidana korupsi, di lain pihak desain nyata-nyata ada kerugian terhadap negara (pasal 32 ayat 10).
13. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (pasal 32 ayat 2).
14. Apabila tersangka pelaku meninggal dunia selama proses pemeriksaan, maka bilamana dibuktikan adanya kerugian terhadap negara maka penuntut umum menyerahkan berita acara sidang kepada jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sedangkan bila bukti dugaan korupsinya kuat, maka Hakim atas tuntutan penuntut umum dapat membuat penetapan rampasan barang-barang yang telah disita (pasal 38 ayat 5).
15. Terbuka peluang seorang terdakwa berhak membuktikan dirinya tidak melakukan pidana korupsi (pasal 37 ayat 1). Dengan ketentuan ini, berarti Undang-Undang ini menganut azas beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang
16. Undang-Undang ini masih mempertahankan ketentuan tentang kemungkinan dijatuhkannya seorang terpidana di luar kehadiran (*in absentia*).
17. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif (pasal 41) dan memperoleh perlindungan hukum berkaitan dengan peran sertanya tersebut.
18. Pemberian penghargaan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi (pasal 42).
19. Membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selambat lambatnya 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, dengan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai peraturan perundangan (pasal 43).

F. Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan yang disebut *scretion*. Hal ini disebabkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut seringkali tidak mengikat secara penuh sehubungan dengan kondisi-kondisi empiris yang berbeda-beda. Nilai-nilai itu misalnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kemudian nilai ketertiban yang lebih bersifat fisik/jasmaniah dan nilai ketenteraman yang lebih bersifat rohaniah. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1979:46).

Dalam memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut di atas bahwa penegakan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Penegakan hukum yang bersifat preventif
- b. Penegakan hukum yang bersifat represif
- c. Penegakan hukum yang bersifat kuratif (Sudarto:1998:1).

Penegakan hukum yang bersifat preventif, dimaksudkan untuk menghadapi *onreth in potentie* (perbuatan melawan hukum yang bersifat potensial) dan bersifat kriminogen, akan tetapi bila kondisinya sangat potensial, maka yang nampak disebut sebagai *police hazard* yang perlu mendapat perhatian khusus.

Penegakan hukum yang bersifat represif dihadapkan pada *onrecht in aCtu* (perbuatan melawan hukum yang nyata/riil/sedang terjadi). Penegakan hukum yang bersifat kuratif, pada

hakekatnya juga merupakan suatu usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan, oleh sebab itu untuk membedakannya, sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindakan represif, namun lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

2. Tahapan-tahapan Dalam Penegakan Hukum

Tahapan-tahapan penegakan hukum tersebut menurut Goldstein yang dikutip oleh Muladi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Penegakan hukum yang bersifat menyeluruh
- b. Penegakan hukum yang bersifat penuh
- c. Penegakan hukum yang bersifat aktual (Muladi:1988:4)

Penegakan hukum yang bersifat menyeluruh (*total enforcement*), tentang dalam ruang lingkup perumusan hukum pidana substantif tuntutan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) ternyata tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena adanya batasan-batasan yang dilakukan oleh hukum acara pidana, misalnya persyaratan-persyaratan perlindungan asasi manusia yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu masih ada pembatasan-pembatasan lain yaitu ketentuan yang tidak dapat dilanggar, misalnya persyaratan adanya aduan pada tindak pidana aduan (perzinahan, pencurian dalam keluarga). Pada jenis tindak pidana ini tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau keluarganya yang berhak, polisi dilarang untuk menangani perkara yang bersangkutan. Ini merupakan ruang lingkup yang bebas dari penegakan hukum (*no enforcement area*).

Sesudah penegakkan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) dikurangi dengan ruang lingkup yang bebas dari penegakkan hukum, maka yang tinggal adalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Penegakan hukum secara penuh ini adalah merupakan bagian yang integral dari penegakan hukum secara menyeluruh, setelah dikurangi dengan pembatasan-pembatasan baik yang bersifat umum maupun khusus. Namun demikian pengkajian secara empiris membuktikan bahwa apa yang dinamakan penegak hukum

secara penuh, pada hakekatnya adalah harapan yang tidak realistis. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa penegak hukum dihadapkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan terpaksa melakukan diskresi. Dengan demikian tampak bahwa ruang lingkup penegak hukum secara penuh menjadi menyusut karena di kurangi ruang lingkup dimana polisi akan mengambil suatu kebijakan untuk tidak menerapkan hukum pidana, sehingga yang tertinggal adalah ruang lingkup penegak hukum secara aktual (*area of enforcement*).

Gambaran konsep Goldstein, menurut Muladi dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk tidak menerapkan hukum pidana secara penuh tidak harus bersifat negatif, berupa terjadinya penyuapan atau korupsi. Banyak faktor lain ternyata berpengaruh terhadap penegakan hukum secara penuh. Dalam keadaan tertentu justru penegak hukum secara penuh akan tidak manusiawi dan bahkan akan menimbulkan penderitaan-penderitaan terhadap warga negara (Muladi 1988:7)

Penegakan hukum dalam hal penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan melalui tiga model dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu:

- a. Model perlawanan (*Adversary Model/attle Model*)
- b. Model kekeluargaan (*Family Model*)
- c. Model terpadu (*Integrated Model*).

Menurut Herbert L Packer yang ditulis kembali oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan utama, Penegakan hukum dari sistem atau model Perlawanan adalah :

- a. Melindungi masyarakat.
- b. Menjaga ketertiban umum terhadap Perilaku yang menyimpang (Barda Nawawi Arief: 1988: 48).

Tujuan SPP adalah perlindungan terhadap kepentingan negara dalam bentuk penekanan terhadap tingkat kejahatan dan nilai dasar ini dilengkapi dengan suatu asumsi dasar bahwa para pelaku tindak pidana pada hakekatnya merupakan musuh masyarakat (*enemy of society*) dan di antara dua kepentingan itu tidak ada keharmonisan (*disharmony of interest*), sehingga fungsi

dan pemidanaan/pidana adalah pengasingan (*exile function of Punishment*), karena pelaku tindak pidana adalah bentuk khusus (*species*) dari manusia yang berbeda dengan manusia yang lain.

Model Perlawanan ini mengalami perkembangan. Menurut Packer dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

- a. Model Pengendalian Kejahatan atau *Crime Control Model* (CCM)
- b. Model Perlindungan Hak atau *Due Process Model* (DPM). (Heni Siswanto :1988:48)

Di dalam CCM, yang menonjol adalah efisiensi di dalam Penekanan kejahatan. Efisiensi ini merupakan bagian dari proses manajemen yang ingin mencapai tujuan dengan cepat. Bentuk CCM menimbulkan reaksi di dalam penerapannya, karena efisiensi tersebut sering dianggap mengorbankan hak-hak individu, sehingga timbul pandangan-pandangan di dalam masyarakat dan yurisprudensi yang dianggap merupakan perbaikan terhadap CCM.

Di dalam CCM efisiensi memegang peran yang paling dominan/menonjol dengan ciri-cirinya:

1. Kecepatan dalam menangani perkara.
2. Ketelitian
3. Target untuk segera memasukkan seseorang yang dicurigai ke dalam penjara.

Kelemahan CCM berasal pula dari efisiensi sebagai tujuan utama yang sering kali harus mengorbankan perlindungan hak-hak individu demi efisiensi dan manajemen yang efektif. Selanjutnya dalam gerakan DPM di samping menekankan efisiensi, menuntut adanya perlindungan hak-hak individu juga menuntut adanya pembatasan kekuasaan dari penguasa dalam penegakan hukum pidana. Namun, apa yang dikemukakan oleh model DPM ini tetap dalam kerangka *adversary* model dengan filosofi yang mendasarinya ialah perbenturan antara dua kepentingan yang tidak dapat didamaikan atau diselesaikan dan menganggap seorang penjahat sebagai jenis khusus dari manusia yang harus diasingkan. Selanjutnya di dalam model kekeluargaan (*family model*) ini, filosofi yang mendasari SPP adalah seseorang untuk bisa menjadi baik bukanlah suasana dihormati antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan dan menganggap pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat, akan tetapi SPP harus dilandasi oleh suasana kepentingan yang saling menunjang satu sama lain antara individu dan pemerintah yang menuju ke harmoni atau keserasian atas dasar pernyataan kasih

sayang diantara sesamanya (*state of love*), bukan sebagai *enemy Of society* John Gniffiths ditulis kembali oleh Heni Siswanto, menggunakan nama dengan model kekeluargaan ini disebabkan ia menggunakan padanan keluarga sebagai bentuk masyarakat yang terkecil dengan alasan bahwa sebenarnya apa yang terjadi didalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan pengelolaan suatu keluarga sebagai suatu bentuk masyarakat terkecil (Heni Siswanto: 1988: 53).

Selanjutnya model terpadu (*integrated mode*) ini terdapat beberapa sistem nilai yang sangat menonjol yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk memperbaiki atau mencari hal-hal yang baik dari berbagai sistem untuk diterapkan. Untuk menciptakan model integratif ini dipersyaratkan adanya bentuk, pendidikan yang terpadu antar sub-sub sistem yang memungkinkan adanya penghayatan yang sama dari penegak hukum terhadap tujuan SPP. Hal-hal yang paling menonjol dalam model integratif ini adalah

1. Efisiensi.
2. Profesionalisme
3. Pendidikan yang terpadu
4. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.
5. Sistem hukum yang konsisten (sistem hukum dalam bentuk substantif atau aturan hukum).

BAB III

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM 12M L

A. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Sebelum penulis mengemukakan tentang kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai aparat penegak hukum yang terlibat tentang struktur hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, struktur kepaniteraan/sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, bagan susunan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan acuan untuk menganalisis tentang mekanisme dalam proses peradilan yang

menyangkut penanganan tindak pidana korupsi sampai pada putusan pengadilan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Bahwa hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang hingga pada tahun 2001 yang didapat dari dokumen, adalah :

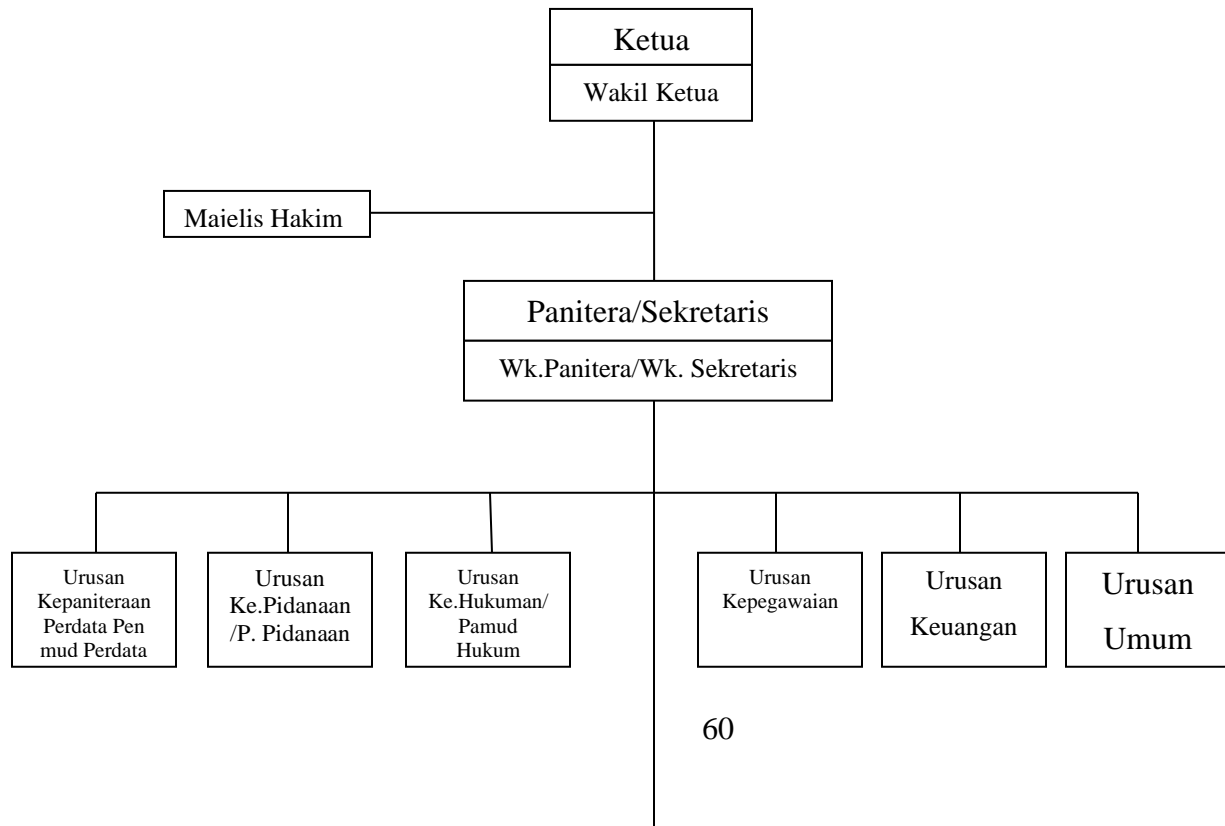
a. Stuktur hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai berikut :

1. Hj. Maryati CH, Akuan, SH (Ketua)
2. H. Efendi Sidiq, SH (Wakil Ketua)
3. Damdam Bachtiar, SH (Hakim)
4. Bachidi, SH (Hakim)
5. Manalu Rambe, SH (Hakim)
6. Anthony Syarif, SH (Hakim)
7. Pardomuan Sidabutar, SH (Hakim)
8. Hasby J. Tolib, SH (Hakim)
9. Ismail, SH (Hakim)
10. Dalium Solian, SH (Hakim)
11. Ratna Mintarsih, SH (Hakim)
12. Cipta Sinuraya, SH (Hakim)
13. Budi Setiyono, SH (Hakim)
14. Zuher Rusnaldi, SH (Hakim)
15. Eddy Wibisono, SH (Hakim)
16. H. Ahsir, SH (Hakim)
17. M. Saleh, SH (Hakim)
18. Adi Ismet RS, SH (Hakim)
19. Heri Sutanto, SH (Hakim)

b. Sturktur Kepaniteraan/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. M. Ram | :Panitera / Sekretaris |
| 2. Laksmi. VD, SH | :Wakil Panitera |
| 3. Yuniar Haiti, SH | : Wakil Sekretaris |
| 4. Surmarndin, SH | : Panitera Muda Perdata |
| 5. Nellyza, SH | : Panitera Muda Hukum |
| 6. Linda Birsye, SH | : Panitera Muda Pidana |
| 7. Dra. Bella Maryana | : Kaur Keuangan |
| 8. M. Yusuf, SH | : Kaur Kepegawaian |
| 9. Zarkasi, SH | : Kaur Umum |

2. Bagan Susunan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang



- | |
|--|
| <p>Kelompok Fungsional Kepaniteraan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Panitera Pengganti2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti |
|--|

Sumber: Dokurnentasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 2001

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang ini

Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 15 September 2001 dengan M. Yusuf, bahwa susunan organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang secara administrasi, meliputi : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum dan Menteri Kehakiman dan Ham.

Sedangkan secara teknis yuridis fungsional, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Jalur vertikal terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
2. Pengadilan Tinggi Lampung
3. Mahkamah Agung

Selanjutnya dalam akuntabilitas Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang terdiri dari Majelis Hakim langsung diketuai oleh Ketua Pengadilan yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas kelancaran dan selesainya tugas pada peradilan baik mengenai segi peradilan, maupun peraturan-peraturan teknis dan pembinaan administrasi, material dan personil.

Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera yang mempunyai tugas antara lain :

1. Memimpin Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
 2. Memberi bantuan kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim dalam perencanaan, dan menyusun kebijaksanaan umum tugas-tugas lain.
 3. Mengawasi., Mengkordinir dan memberi bimbingan pada unit-unit kesatuan tugas dibawahnya dalam melaksanakan serta kebijaksanaan yang telah digariskan oleh ketua Majelis Hakim.
- Kemudian badan yang lain di dalam Pengadilan ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Juru sita, dan juru sita pengganti adalah penjabat umum, yang masing-masing diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Kepala Pengadilan Negeri.
- b. Dalam bidang Pengadilan, mempunyai tugas yang diberikan oleh ketua sidang, melainkan pemberitahuan-pemberitahuan, pengumuman-pengumuman, proses melakukan pensitaan atau perintah ketua Pengadilan atau panitera, dan membuat berita acara tentang pensitaan. berdasarkan keterangan di atas, maka dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibatasi oleh daerah hukum atau wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana mereka bertugas.

B. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Berdasarkan uraian mengenai kondisi hakim, kepaniteraan dan struktur organisasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang maka telah diperoleh beberapa keterangan yang dapat mendukung bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan melalui proses peradilan dimaksud. Oleh karena itu untuk mengetahui berapa jumlah kasus tindak pidana dalam kurun waktu sampai tahun 2001 yang merupakan sisa perkara tahun lalu, sedangkan dalam proses peradilan dan yang telah ada putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nellyza selaku Panitera Muda Hukum (14 September 2001), bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang meliputi perkara sumir atau dikenal dengan sebutan perkara singkat, perkara rool atau disebut dengan perkara ringan dan perkara biasa. Untuk mengetahui perkara tersebut, maka ditunjukkan tabel data rekapitulasi perkara pidana tahun 2001 sebagai berikut :

Tabel : Rekapitulasi Perkara Pidana Tahun 2001

Bulan	Sumir			Perkara Masuk			Perkara Putus			Sisa Akhir		
	B	S	R	B	S	R	B	S	R	B	S	R
Januari	144	-	-	55	1	273	58	-	275	141	1	-
Februari	141	1	-	56	2	457	77	1	547	120	2	-
Maret	120	2	-	63	2	37-5	52	1	375	131	3	-
April	131	3	-	57	2	462	49	3	462	139	2	-
Mei	139	2	48	48	-	553	85	2	553	102	-	-
Juni	102	-	64	64	-	624	38	-	624	128	-	-
Juli	128	-	49	69	-	1.026	63	-	1.026	134	-	-
Agustus												
September												

Oktober												
Desember												
Keterangan:	- sisa awal - Perkara Masuk -Perkara Putus - Sisa Akhir					B	-Biasa (Perkara Biasa) -Sumir (Perkam Singkat) -Roll (Perkam Ringan)					
						s						
						R						

Sumber: Dokumentasi pengadilan kelas 1A Tanjungkarang

Rekapitulasi perkara pidana sampai dengan juni 2001 melihat bahwa untuk perkara sumir atau perkara singkat tidak ada sisa akhir perkara, begitu pula dengan perkara Roll atau perkara ringan yang jumlah sekitar 1.026 perkara dan dapat diputus tanpa ada sisa akhir perkara. Dan yang ada sisa perkara yaitu perkara biasa yang telah diputus ada 63 perkara pidana dan sisa akhir ada 134 perkara pidana. Dan 63 kasus perkara pidana tersebut termasuk di dalamnya perkara tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai ketetapan hukumnya yang tetap hanya satu kasus, yakni: Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang No 151/Pid/B/1999/PTNK Adapun kebijakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dalam putusan Nomor 151/Pid/B/1999/PTNK terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin.

Kebijakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diproses di Pengandilan Negeri Kleas 1A Tanjungkarang adalah dengan penyelesaian secara penal. Hal ini berdasarkan dengan wawancara dengan Agus Djunaidi (14 September 2001) selaku hakim ketua yang menangani kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin yang telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan penegak hukum dalam perkara pidana korupsi hanya satu (1) yang telah ada putusan pengadilan yaitu nomor 151/Pid/B/1999/PTNK tanggal 22 April 1999. Data dan dokumentasi diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

Pada tahun 1996, 1997, dan 1998 di kantor PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, Bastari Maudin Bin Maudin telah menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai

kasir atau pejabat sub bagian kas pada kantor PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang merugikan keuangan negara.

Terdakwa tidak ditahan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 151/Pid/B/1999/PTNK tanggal 22 April 1999. Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum (Muhammad Rozie Ivan Damanik dan Rusman), pada pokoknya menuntut:

- (1) Menyatakan terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin bersalah melakukan tindak pidana korupsi diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.

(3) Menyatakan barang bukti berupa:

- a. I (satu) bidang tanah seluas 195 M² berikut rumah semi permanen di atasnya yang terletak di desa Langkapura Jl. Hi. A. Muis Tuan Ria Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, Satu unit kendaraan minibus warna putih tahun 1995 No Pol BE 2927 AS, uang tunai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara cq. PDAM Way Rilau Bandar Lampung.
- b. Buku giro Bank BDN tahun 1998, buku giro Bank Exim Telukbetung tahun 1998, buku giro Bank BPD buku kas umum, PDAM Way Rilau tahun 1998; lanjutan buku Kas PDAM Way Rilau tahun 1997, buku giro Bank BTN tahun 1997, buku giro Bank Exim Tanjungkarang tahun 1997, buku giro Bank Exim Tanjungkarang tahun 1997, buku kas umum PDAM tahun 1997, buku kas umum PDAM tahun 1997 lanjutan buku giro, Bank Exim Tanjungkarang tahun 1996; buku Giro Bank Exim Telukbetung tahun 1996, buku giro Bank Exim Tanjungkarang tahun 1996 lanjutan; buku giro Bank blow to BPD tahun 1996, buku Pro Bank BDN tahun 1996, buku kas umum PDAM Way Rilau tahun 1996, buku kas umum ke 1 tahun 1996, Rekening koran Bank BPD No. 202.020.016.27 bulan januari s/d Desember

1997; Januari s/d November 1998, Januari s/d November 1998; Rekening koran Bank Exim Telukbetung bulan Januari s/d September 1996, Januari S/d Nopember 1998; Rekening koran Bank BPD bulan Januari s/d Desember 1996 Januari s/d September 1997; Januari s/d Nopember 1998, Rekening koran Bank Exim Tanjungkarang No. 5069 bulan: Januari s/d Desember 1996 - Januari s/d Desember 1997 - Januari sd Oktober 1998; Potongan cek pembayaran Alum Tawas an. CV. Belitang Reananda yang dicairkan Bastari Maudin dan potongan cek Rp 136.500.000 OD Kwitansi penyetoran/ penerimaan dari Bank tahun 1997/1998 ; Daftar penyetoran tunai Kas PDAM Way Rilau tahun 1997 dan 1998, tanggal 12-02-1999 yang dibuat Tim Pemeriksa PDAM. Selanjutnya dikembalikan kepada PDAM Way Rilau Bandar Lampung.

- (4) Menetapkan supaya terpidana Bastari Maudin bin Maudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

Adapun hal-hal yang meringkan terpidana, disamping itu adanya nota pembelian dari penasehat hukum, pada pokoknya :

- (1) Menyatakan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) b. jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- (2) Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara dan denda yang seringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum
- (3) Menyatakan barang bukti berupa sebuah rumah dan tanah seluas 165 M di Jl. Muis Tuan Rai No. 33 Rt 003 Rw. 001 LK III Kelurahan Langkapura Tanjungkarang Barat, dikembalikan kepada terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin.

Disamping itu setelah mendengar jawaban penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa, pada pokoknya; menolak nota pembelian penasehat terdakwa, memutuskan perkara sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 23 Juni 1999.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum meliputi dakwaan primer, subsider dan lebih subsider. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rozie (12 September 2001)

selaku jaksa Penuntut umum dalam kasus pidana korupsi Bastari Maudin Bin Maudin yakni:

(1) Primer

Menyatakan Bahwa terdakwa Bastari Maudin bin Maudin yang diangkat sebagai kasir pada kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kota Bandar Lampung Nomor 240/08O/PDAM/1989 tanggal 31 Maret 1989 dan kemudian diangkat sebagai Kasubag Kas (Kepala Sub Bapian Kas) dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Kota Bandar Lampung Nomor KP 609/PDAM/1997, tanggal 22 Maret 1997.

Selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 27 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 16 Oktober 1998, terdakwa Bastari Maudin bin Maudin telah bertindak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang. Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian bangsa dalam hal ini PDAM Way Rilau milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang dilakukan terdakwa secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut.

Bahwa la terdakwa Bastari Maudin bin Maudin dalam jabatan atau kasir maupun Kepala Sub Bagian Kas pada kantor PDAM Way Rilau yang seharusnya menerima pembayaran lain secara langsung atau penerimaan rutin pada hari berikutnya ke Bank yang telah ditunjuk perusahaan PDAM Way Rilau berdasarkan bukti yang sah, kemudian seharusnya membukukan atau mencatatnya pada buku kas umum, buku kas dan buku Giro Bank PDAM Way Rilau atau setidaknya pada pembukuan yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan Pasal 87 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 09 tahun 1986 tanggal 25 juli 1986 jo. Pasal 12 (4), Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 12 tahun 1977. tanggal 4 September 1997, namun sebaliknya terdakwa tidak membukukannya sebagaimana mestinya dan tidak menyetorkan uang penenmaan PDAM Way Rilau kepada Bank yang menjadi mitra PDAM Way Rilau dengan rincian sebagai berikut:

1) Tahun 1996

Penerimaan uang loket PDAM Way Rilau tanggal 27 Agustus 1996, jumlah Rp 3.590.365,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) tidak dibukukan pada buku kas. Uang tersebut dipergunakan sendiri. Setoran uang tunai PDAM Way Rilau ke Bank Mitra PDAM Way Rilau pada BTN Cabang Bandar Lampung per 31 Desember 1996 jumlah Rp 256.605.545, (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), oleh terdakwa tidak disetorkan ke BTN Cabang Bandar Lampung. Secara keseluruhan, setelah dikurang, dengan yang lainnya dan adanya saldo asli pada rekening koran Rp 71.605.545,00 sehingga jumlah selisih menjadi Rp 185.000.000.00 Oleh karena itu ketekoran kas PDAM Way Rilau per 31 Desember 1996 sebesar Rp 188.590.365.00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

2) Tahun 1997

Setoran uang PDAM Way Rilau yang tidak disetor adalah P

a. Pada, BTN Cabang Bandar Lampung Nomor rekening G 00001711 :

- Tanggal 24 Maret 1997 sebesar Rp 17.500.000.00
- Tanggal 30 juli 1997 sebesar Rp 50.000.000
- Tanggal 29 Agustus 1997 sebesar Rp. 8000000000
 - b. Disetor tunai tidak jelas ditulis ke Bank Mitra PDAM Way Rilau Tanggal 23 September 1997 Rp. 954. 500. 00
 - c. Pada Bank Exim Cabang Telukbetung
 - Rekening Nomor 027.008 9027642
 - Tanggal 26 Desember 1997 Rp. 60.000.000.00
 - Jumlah ketekoran Kas PDAM Way Rilau per 31 Desember 1997 sebesar Rp. 136.445.500.00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

3) Tahun 1998

Uang yang tidak disetorkan ke Bank Mitra PDAM Way Rilau

a. Pada Bank Exim Cabang Telukbetung.

Tanggal 27 Februari 1998 sebesar Rp. 40.000.000.00

b. Disetor tunai, tetapi tidak jelas

Ke Bank Mitra PDAM Way Rilau:

- Tanggal 24 September 1998 sebesar Rp. 48.500.000.00
 - Tanggal 25 September 1998 sebesar Rp. 45.000.000.00
 - Tanggal 1 s/d 15 Oktober 1998
(dipakai sendiri) sebesar Rp. 5.314.298.00
- c. Ketekoran per 5 Oktober 1998 sebesar Rp 138.814.298.00

Dengan demikian ketekoran Kas PDAM Way Rilau (kerugian negara) jumlah keseluruhan tahun 1996,1997 dan 1998 Rp. 463.850.163.00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah enam puluh tiga rupiah).

Adapun uang sebesar tersebut di atas dipergunakan oleh terdakwa untuk membangun kembali rumah di jalan Hi. A. Muis Tuan Rai No. 33 Rt. 003 Rw. 001 LK III Kelurahan Langkapura Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dan untuk membeli mobil Toyota Kijang buatan tahun 1995 Nomor Polisi BE 2927 AS dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan Bastari Maudin bin Maudin telah merugikan negara sebesar Rp 46385016300 empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal I ayat (1) b. jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

(2) Subsider

Bahwa terdakwa Bastari Maudin bin Maudin diangkat sebagaikasir pada kantor PDAM Way Rilau berdasarkan surat keputusan Direktur PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor : KP 240/080/PDAM/1989 tanggal 31 Maret 1989 dan Kemudian diangkat sebagai Kasubag Kas dengan surat keputusan nomor IKP.609/PDAM/1997 tanggal 22 Maret 1997. Atas jabatan tersebut terdakwa sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya di dengan cara tidak membukukan atau mencatat pada buku Kas atau buku Giro PDAM uang pendapatan dari PDAM Way Rilau. Dengan demikian menyalahi aturan sebagaimana pasal 87 huruf e Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 tahun 1986 tanggal 24 Juli 1986 jo pasal 12 (4) Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 1997 tanggal 4 September 1997 selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan penerimaan PDAM

Way Rilau kepada Bank-Bank Yang menjadi Mitra PDAM Way Rilau dengan rincian sebagai berikut

1) Tahun 1996

- Penerimaan uang loket PDAM 27 Agustus 1996 Rp. 3.590.365.00 tidak disetorkan
- Setoran uang tunai PDAM Way Rilau ke beberapa Bank Mitra PDAM tidak disetorkan, sehingga per 31 Desember 1996
- Tanggal 1 s/d 5 Oktober 1998 digunakan sendiri sebesar Rp. 5.314.298,00

Jadi jumlah ketekoran Kas PDAM Way Rilau per 5 Oktober 1998 sebesar Rp 138.814.298.00 Sehingga jumlah ketekoran seluruhnya dari tahun 1996-1997 dan 1998 sebesar Rp. 463.850.163.00. Akibat perbuatan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin dalam hal ini PDAM Way Rilau dirugikan sebesar Rp. 463.850.163.00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 415 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah menimbang eksepsi penasehat hukum terdakwa, majelis hakim telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan eksepsi penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima
- Memerintahkan agar pemeriksaan dalam perkara terdakwa tersebut dilanjutkan

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan para saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

(1) H. Opang Suparno

Saksi sebagai Direktur Utama PDAM Way Rilau milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sejak tahun 1995. selanjutnya saksi mengetahui kalau Kasubag Kas melakukan penyelewengan, bermula dari kecurigaan saksi dimana terdakwa membuat cek salah, dan pada tanggal 22 September 1988, saksi menanyakan keadaan kas kepada terdakwa, dan Kasubag Kas melaporkan posisi keuangan di PDAM ada Rp. 430.000.000.00.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1998 saksi memerintahkan terdakwa untuk membayar obat, tetapi tidak dilakukan sehingga pada tanggal 5 Oktober 1998 saksi

menanyakan kepada terdakwa apakah ada masalah di keuangan ? Dijawab oleh terdakwa, bahwa ia telah memakai uang kantor PDAM.

Selanjutnya saksi memerintahkan Kabag Keuangan dengan Kepala Satuan Pengawas Intern (SPT) untuk melakukan kas Opname (Pemeriksaan brankas dan kas Bank). Dari hasil pemeriksaan Tim tersebut ternyata uang PDAM yang hilang sebesar Rp. 410.000.000.00.

Bahwa saksi telah memberi kesempatan selama satu minggu kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipakai tersebut namun terdakwa menyerah tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan ke Walikota Bandar Lampung, setelah melapor, maka saksi melakukan tindakan yaitu membebas tugaskan terdakwa dari jabatan Kasubag Kas dan meminta jaminan kepada terdakwa berupa surat tanah, rumah dan surat mobil kijang.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh Tim Inspektorat Wilayah Kota Bandar Lampung dengan hasil temuan secara rekapitulasi jumlah kerugian PDAM sebesar Rp. 463.850.163.00.

(2) Muhammad Ali Hasanudin bin Abdullah

Bahwa saksi bertugas di PDAM Way Rilau Bandar Lampung sejak Desember 1985 dan diangkat sebagai Kabag Keuangan sejak 22 Desember 1996, dengan tugas menerima laporan keuangan dari Kasubag Kas, Kasubag Penagihan, Kasubag Akuntansi

Memberi keterangan bahwa setelah diadakan pemeriksaan Inspektorat Kota Bandar Lampung ditemukan selisih Rp. 419.005.759.99 sedangkan hasil Audit oleh tim BPKP Lampung ditemukan selisih negatif keuangan PDAM Way Rilau sebesar Rp. 463.850.613.00 dan Tim BPKP Lampung dalam melakukan Audit secara rinci).

(3) Syanifuddin, SE bin Sulaiman Jamil

Bahwa saksi bertugas dan menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PDAM Way Rilau Bandar Lampung sejak bulan Maret 1997 dengan tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas prosedur dan tata cara kerja pada setiap bagian di PDAM Way Rilau dan melaporkan hasil tersebut kepada Direktur

Utama. Oleh karena itu berdasarkan perintah Direktur Utama, saksi bersama. Kabag Keuangan pada tanggal 5 Oktober 1997 telah melakukan Opname kas dengan hasil penemuan selisih negatif sebesar Rp. 410.830.993.99 dan atas selisih saldo kas PDAM Way Rilau yang bertanggung jawab adalah Bastari Madiun sebagai Kasubag Kas.

(4) Nazarudin Kadir

Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan was kebocoran keuangan yang mengakibatkan kerugian di PDAM Way Rilau Bandar Lampung berdasarkan Surat Perintah No 42. Spt WAS 11:1998, tanggal 8 Oktober 1998. Dari hasil pemeriksaan dan Tim tersebut data Le bocoran uang PDAM Yang dilakukan oleh Kasubag Kas (Bastari Maudin) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 1-1 – 1998	Rp 29376466281
Jumlah penerimaan 1-1-98 s/d 5 - 10-98	Rp. 747631278015
Jumlah pengeluaran 1-1-98 s d 5- 10-98	Rp. 732473091516
Selisih	Rp.151.581.864.48
Saldo Buku	Rp 445.346.527.29
Saldo Kas dan Bank	
a. Kas per 5 Oktober 1998	Rp. 746.132.500

b. Bank per 5 Oktober 1998

- BII Tanjungkarang	Rp. 88.468.689.
- BII Telukbetung	Rp. 261.544.50
- BRI	Rp. 15.653.484.69
- BTN	Rp. 1.781.327.00
- BNI 1946 dan BDN	Rp. 208.217.22
- Jumlah	Rp. 18.870.442.30
- Total Kas dan Bank	Rp. 26.340.767.30
- Perbedaan Kas dan Buku	Rp. 419.005.759.99

(5) Melina BF

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di PDAM Way Rilau sejak tanggal 8 s/d 22 Oktober 1998 hasil pemeriksaan adanya kerugian sebesar Rp. 4.195.759.99 dan telah diamankan sertifikat tanah dan surat mobil kijang beserta uang Rp. 10.000.000.00/

(6) Supriati bin Sabri Bintoro

Bahwa saksi sebagai petugas menerima pembayaran rekening air tunggakan-tunggakan, kemudian menyetorkan ke kasir, yakni Bastari Maudin dengan menggunakan LPP yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Dan saksi tahu kalau Bastari Maudin telah melakukan penyelewengan uang PDAM setelah membaca koran.

(7) Taufik bin M. Sujana

Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Penangguhan Way Rilau dengan tugasnya membantu Kabag Keuangan dalam mengoreksi penagihan rekening air dan tunggakan serta mengkordinir rekening air bulan berjalan ke loket pembayaran atau bank-bank. Adapun saksi mengetahui berita di koran kalau adanya korupsi yang dilakukan oleh Bastari Maudin sebanyak Rp. 40.000.000.00.

(8) Jamilah Binti Muhammad Ali

Bahwa saksi bertugas di staf umum, PDAM Way Rilau dan saksi mengetahui Kalau terdakwa melakukan penyelewengan keuangan PDAM, telah ada pemeriksaan dari inspektorat.

(9) Emilia Murti Wahyuni Binti Sugiman

Bahwa saksi bertugas membukukan semua penerimaan dan pengeluaran harian menerima bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran tersebut. Bahwa saldo akhir BKU tanggal 5 Oktober 1998 sebesar Rp. 445.346.527.19. Kemudian saksi menerangkan adanya perbedaan jumlah kas tersebut dengan pemeriksaan Inspektorat bulan Oktober 1998.

(10) Abraham bin Hendro

Bahwa saksi bertugas sebagai Kasubag sejak 1 November 1997 dengan tugas membuat laporan bulanan dan tahunan. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Tim inspektorat ditemukan selisih saldo kas sebesar Rp.

419.005.759.99 atas selisih kas tersebut menjadi tanggung jawab Bastari Maudin sebagai Kasubag Kas.

(11) Fachrudin bin H. Ibrahim Toha

Bahwa selama sebagai Direktur Umum Way Rilau sejak tahun 1996 dan saksi mengetahui Kasubag Kas melakukan penyelewengan atas uang PDAM Way Rilau, pada Oktober saksi dipanggil Direktur Utama bersama-sama dengan Kabag-kabag lain dari SPI. Bahwa yang disalahgunakan oleh Kasubag Kas sebesar Rp. 463.850.165.00 dengan cara memalsukan rekening koran.

(12) Achmad Toha bin Abdul Aziz

Bahwa saksi mengetahui penyelewengan oleh Bastari Maudin setelah pemeriksaan Inspektorat. Menurut keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menjadi pertimbangan tersendiri, maka dihadirkan para saksi ahli yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tahan Sitompul

Bahwa saksi telah mendapatkan data dari hasil pemeriksaan, maka memberikan keterangan, bahwa yang dirugikan adalah negara cq. PDAM Way Rilau Bandar Lampung. Bahwa tidak ada kebocoran antara buku kas dengan rekening koran adalah jumlah normal uang yang tercantum didalam rekening koran yang dibuat sendiri oleh terdakwa. Bahwa yang diperiksa oleh BPKP pada tanggal 1 Februari 1999 adalah Buku Kas, Umum Buku Bank dan bukti-bukti pengeluaran.

2. La Ode Muhammad Rere

Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kantor PDAM Way Rilau pada bulan Februari 1999 atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Bahwa hasil pemeriksaan khusus ada penyeteroran ke Bank. Akibatnya kerugian PDAM Way Rilau sebesar Rp. 463.850.105.00.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi ahli terdakwa tidak keberatan. Selain itu penuntut umum juga mengajukan surat-surat berupa

- I (satu) sertifikat tanah milik No 1254/LKP

- I (satu) buah BPKB Mobil Seri A No. 2770588 dan STNK No 0020240/LP/1978 tanggal 26. Juni 1997 mobil Toyota Kijang KF 40 Nopol BE 2927.
- Beberapa buku Giro Bank dan Rekening koran, potongan cek kwitansi penyeteran, daftar PPH/PPN yang dibuat oleh Pemeriksa PDAM Way Rilau.

Bahwa kerugian keseluruhan sejak tahun 1985 s/d 1998 sebesar Rp. 463.850.163.00 dan dari uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk membeli mobil, merehab rumah dan sisanya sebanyak Rp. 10.000.000.00 dimasukan ke deposito an. Terdakwa.

Bahwa menimbang berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli, surat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa tersebut, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta. Secara keseluruhan (tidak dirinci) besarnya uang Rp. 463.850.163.00 ketekoran PDAM Way Rilau Bandar Lampung yang telah pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah, maka kesemua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dipenuhi. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

- (1) Primer Melanggar Pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
- (2) Subsider Melanggar Pasal 1 ayat (1) a jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Lebih Subsider: Melanggar Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 ayat (1)c jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) b JO pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana, didakwakan dalam dakwaan primer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sasaran yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan
4. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang perbuatan berlanjut.

Unsur-unsur sebagaimana, didakwakan dalam dakwaan primer, maka dapat dipahami mengenai unsur-unsur tersebut adalah:

- ad. 1. Unsur barang siapa, meliputi, siapa saja atau setiap orang dapat diajukan sebagai terdakwa, dan satu-satunya orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Bastari Maudin bin Maudin; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur barang siapa dalam tindak pidana ini telah terpenuhi
- ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, Bahwa uang sejumlah Rp. 463.850.163.00 merupakan kerugian PDAM Way Rilau yang dipergunakan terdakwa untuk berpendapat unsur tersebut termasuk dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.
- Ad. 3. Unsur penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dengan terdakwa telah menduduki atau menjabat sebagai Kasubag Kas PDAM Way Rilau sejak tanggal 22 Maret 1997 sampai dengan 7 Oktober 1998, dengan jabatan tersebut telah disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan membeli mobil, merehab rumah dan mempunyai rekening bank tersendiri, sehingga dari jabatannya, kesempatan yang dipergunakan untuk menyelewengkan keuangan negara yang berakibat adanya ketekoran Kas PDAM Way Rilau Bandar Lampung.
- ad.4. Unsur secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai kasir dan Kasubag Kas PDAM Way Rilau telah menyalahgunakan wewenangnya, tidak menyetorkan uang pembayaran rekening air yang diterima langsung maupun tidak langsung ke Bank Mitra PDAM Way Rilau yang telah ditunjuk dengan jumlah Rp.

463.850.163.00 yang dilakukan secara berturut-turut dalam kurun waktu tahun 1996,1997 dan 1998 tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan di atas, sesuai dengan dakwaan primer yang telah terbukti, maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu terdakwa terbukti bersalah dan terbukti pula mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas dasar selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan pembeda dan pemaaf untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dilihat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap terdakwa. Hal ini sebagai upaya penegakan hukum dan juga sebagai kebijakan penegakan hukum dalam memutus kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bastari Maudin bin Maudin, pertimbangan sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dilakukan justru pada saat-saat pemerintah sedang menggalakkan dan meningkatkan pemberantasan korupsi sebagaimana dilakukan terdakwa.
- Hal-hal yang meringankan: Bahwa terdakwa menyesalkan perbuatannya berlaku sopan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit belit serta sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anak.

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 Undang-Undang 140 3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah mengadili dan menyatakan "Bastari Maudin bin Maudin" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta), subsider 1 bulan kurungan.

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa

- Satu bidang tanah seluas 195 M yang terletak di desa Langkapura, berikut sebuah bangunan semi permanen dan satu buah sertifikat No 1254/LKP atas nama Bastari Maudin dikembalikan kepada terdakwa Bastari Maudin bin Maudin
- Satu unit kendaraan mobil Toyota Kijang No. Pol BE 2927 AS tahun 1995 dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara cq. PDAM Way Rilau Bandar Lampung
- Kesemua surat bukti tersebut di atas dikembalikan kepada PDAM Way Rilau Bandar Lampung
- Menghukum terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, tanggal 15 Juli 1999 oleh Agus Djunaidi Sebagai Hakim Ketua, Ismail dan Rama Mintarsih sebagai Hakim Anggota, dan Suryadi Panitera Pengganti, dihadiri Muhammad Rozi Ivan Damanik dan Rusman masing-masing sebagai Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang terhadap kasus pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum, yang tetap atas terpidana "Bastari Maudin bin Maudin" dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.00 subsider 1 bulan kurungan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00.

Mencermati atau menganalisis putusan tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut

1. Kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sejak tahun 1996, 1997, 1998 dan proses peradilan dari tahun 1998 s/d 1999. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tertanggal 15 juli 1999. Hal ini memang tepat dengan merujuk Undang-Undang No 3 tahun 1971, disamping perundangan pasal 64 ayat (1) KUHP, juga belum diundangkannya Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang baru diundangkan tanggal 16 Agustus 1999.
2. Jika dilihat dari KUHP, maka pasal-pasal yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi disetarakan dengan delik penyuapan yang tertuang dalam Bab XXVIII Buku 11

khususnya pasal 209, 210, 220, 231, 387, 388, 415, 425, dan 430. Hal ini pula termasuk dalam kejahatan biasa. Oleh karena itu sanksinya juga sangat ringan. Kemudian pada pasal 1 (satu) KUHP juga dijadikan pedoman bagi hakim memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan hal-hal yang paling menguntungkan atau mempertimbangkan terdakwa. Dan oleh sebab itu kebijakan hakim untuk menjatuhkan perkara tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan kebijakan hakim itu sendiri.

3. Selanjutnya jika dikaji dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Korupsi, terutama merujuk pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tersebut merupakan kebijakan Majelis hakim setelah mempertimbangkan, dakwaan primer dan subsider dan pertimbangan saksi-saksi ahli dan penasehat hukum. Keputusan itu juga merupakan kebijakan dari hakim itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan secara selintas sangat ringan dibanding dengan jumlah yang dikorupsi oleh terdakwa Bastari Maudin, baik pidana penjara yang hanya 1 tahun, ditambah 1 bulan kurungan serta denda sebesar Rp. 3.000.000.00 dan ongkos perkara Rp 5.000,00 serta disita satu mobil, dan uang tunai Rp 10.000.000.00 tidaklah sepadan dengan uang yang telah dikorupsi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ada sanksi minimal dan maksimal. Dan tidak dijatuhkan sanksi maksimal oleh Majelis Hakim itu merupakan kebijakannya dengan mempertimbangkan
 - a. Adanya tindak pidana korupsi, tetapi sebagian telah disita dan dirampas uang tunai Rp 10.000.000.00
 - b. Sudah lama mengabdikan sebagai pegawai negeri di PDAM Way Rilau dan berdasarkan SK Direktur PDAM Nomor KP 240/080/PDAM/1989 diangkat sebagai Kasubag Kas
 - c. Itikad baik, dengan terus terang kepada Direktur Utama PDAM Way Rilau atas penggunaan uang tersebut, meskipun sampai batas waktu tidak dapat mengembalikan, tidak berbelit-belit dalam persidangan dan sopan
 - d. Mempunyai isteri dan anak-anak (Anthony Sanif. Wawancara, 17 September 2001)

Dengan pertimbangan di atas berarti Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak terpaku kepada Undang-Undang yang berlaku, tetapi berdasarkan pertimbangan di atas.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentunya tidak serta merta mempertimbangkan yang meringankan, melainkan hakim juga harus melihat bahwa Bastari Maudin bin Maudin telah terbukti bersalah dan meyakinkan. Seharusnya ada pertimbangan dengan memperhatikan

- a) Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pasal 28 "ancaman hukum pidana bagi pelaku pidana korupsi adalah hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah".

Melihat kenyataan yang demikian, maka Bastari Maudin bin Maudin hanya di pidana penjara 1 (satu) tahun, ditambah 1 bulan kurungan serta denda Rp.3.000.000.00 dan ongkos perkara Rp. 5.000,00. Keputusan ini jauh sekali dari tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, agar yang akan bertindak korupsi jera dan menjadi peringatan bagi yang akan bertindak korupsi di masa yang akan datang. Meskipun tidak mungkin dituntut dengan ancaman hukuman maksimal sebagaimana termaksud dalam pasal 28 Undang-Undang tersebut.

- b) Perluasan hukuman tambahan tentang perampasan terhadap barang yang diatur dalam pasal 30 KUHP, sehingga dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan ketentuan perampasan barang-barang tetap dan tidak tetap berwujud dan tidak berwujud, perusahaan dan benda lain yang menjadi pengganti benda yang diperoleh dari hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 34).

Memperhatikan keterangan tersebut di atas, bahwa Bastari Maudin bin Maudin yang telah melakukan tindak pidana korupsi Rp. 463.850.163.00 yang merugikan negara atau PDAM Way Rilau dalam putusan Hakim hanya dirampas uang Rp 100.000.000.00, mobil Kijang Standard yang nilainya tidak seimbang dengan harta yang dikorupsi juga yang mengherankan bahwa satu bidang tanah luas 195 M di desa langkapura berikut sertifikat No: 1254LKP atas nama Bastari Maudin bin Maudin dikembalikan kepada terpidana.

Dengan demikian putusan hakim dalam mengadili terdakwa Bastari Maudin bin Maudin atas kasus tindak pidana korupsi yang telah menugikan keuangan negara atau PDAM Way Rilau Bandar Lampung belum memenuhi rasa keadilan, meskipun demikian untuk kepastian hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah melakukan dengan baik. Akan tetapi dan semangat penegakan hukum dalam rangka "Supermasi Hukum" belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu wajar apabila jaksa Penuntut Umum tidak menerima keputusan tersebut yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan dalam rangka penegakan hukum. Untuk itu sudah menjadi kelaziman bahwa jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Kebijakan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menangani perkara Banding Pidana terhadap permohonan jaksa. Selanjutnya menyelesaikan kasus perkara banding pidana atas nama terdakwa Bastan Maudin Bin Maudin yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny Edith D. Tobing Nababan (15 September 2001) selaku Ketua Majelis menyatakan bahwa Kebijakan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (a) menerima permohonan banding oleh jaksa penuntut umum, (b) menyelesaikan dengan sarana penal atau menyelenggarakan persidangan tentang perkara tersebut. (c) menguatkan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 151/Pid.B/1999/PN TK tanggal 15 juli IW9, (d) mengadili dan memberikan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Reg Nomor 25/PIW19W/PTT(, tanggal I November 1999 atas nama, terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin).

Berdasarkan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDS 11-04/TJKR 703999, tanggal 27 Maret 1999 Dalam Surat tersebut meliputi dakwaan primer, subsider dan lebih subsider. Oleh sebab itu berikut Hal dikemukakan tentang dakwaannya, yakni

a. Dakwaan Primer

Bahwa dakwaan primer ini, sama dengan dakwaan sebelumnya, yakni secara singkat dikemukakan, bahwa terdakwa Bastari Maudin bin Maudin diangkat sebagai kasir dan Kasubag Kas Way Rilau berdasarkan keputusan direktur PDAM Way Rilau Nomor KP 240/080/PDAM/1989 Tanggal 31 Maret 1989 Kemudian sejak tanggal 27 Agustus 1996 sampai dengan Tanggal 16 Oktober 1996 telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mempergunakan untuk tujuan menguntungkan diri sendir atau

orang lain, atau badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau milik Pemda Bandar Lampung yang dilakukan secara berturut-turut sehingga sebagai pembuatan berlanjut dengan cara sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan sebelumnya Akibat perbuatan terdakwa Maudin bin Maudin dalam hal ini PDAM Way Rilau kota Bandar Lampung dirugikan sebesar Rp 463.850.163.00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Oleh karena itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) b jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Subsider

Bahwa terdakwa Bastari Maudin bin Maudin yang diangkat sebagai kasir dan Kasubag Kas PDAM Way Rilau berdasarkan SK Direktur PDAM Way Rilau Nomor KP. 240/080/PDAM/1989 Tanggal 31 Maret 1989 dan SK direksi PDAM Way Rilau Bandar Lampung .

Nomor KP 609/PDAM/1997 tanggal 22 Maret 1997 pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair dalam dakwaan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui dan patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara dalam hal ini PDAM Way Rilau milik Pemda Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan cara-cara sebagaimana telah dikemukakan dalam dakwaan Subsidaire sebelumnya.

Perbuatan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin Itu tidak sesuai dengan Pasal 87 Huruf o peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 1986 tanggal 24 juli 1986 jo Pasal 12 (4) keputusan Walikota Madya Bandar Lampung, No 12 Tahun 1997 tanggal 4 September 1991, namun sebaliknya terdakwa tidak membukukannya, atau membukukannya, tidak sebagaimana mestinya dan tidak menyertakan uang

penerimaan PDAM Way Rilau kepada Bank-Bank yang menjadi Mitra PDAM Way Rilau dan secara rinci telah disebutkan dalam dakwaan sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin dalam hal ini PDAM Way Rilau milik Pemda Kota Bandar Lampung dirugikan sebesar Rp 463.850.163.00 empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu, seratus enam puluh tiga rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I ayat (1) bjo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

c. Lebih Subsida

Bahwa terdakwa Bastari Maudin bin Maudin yang diangkat sebagai kasir pada kantor PDAM Way Rilau dan juga diangkat sebagai kas PDAM Way Rilau Seharusnya ia sebagai orang yang dibina untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan pekerjaan namun pada waktu tempat seperti telah dikemukakan dalam dakwaan primair dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp 463.850.163.00 atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dilakukan oleh terdakwa secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan cara sebagai mana telah didakwakan sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung dirugikan sebesar Rp 463.850.163.00 (Empat Ratus enam Puluh Tiga juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Dengan demikian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 KUHP jo Pasal I ayat (1) Jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Surat tuntutan jaksa, Penuntut Umum tertanggal 23 jui 1999 Nomor Reg Perkasa: PDS 11-04/EJKAR/0399 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- (1) Menyatakan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal I ayat (1) b jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair,
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bastari Maudin bin Maudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan dipidana denda sebesar Rp 5.000.000.00 subsidi 3 bulan kurungan.
- (3) Menyatakan barang bukti: satu bidang tanah luas 295 M² berikut bangunan, satu unit kendaraan minibus standar warna putih tahun 1995 Nopol BE 29V AS dan uang tunai Rp 10.000.000.00 (Sepuluh juta Rupiah) dirampas untuk negara cq. PDAM Way Rilau. Dan seluruh barang bukti berupa buku Giro Bank dan kertas berharga lainnya dikembalikan kepada PDAM Way Rilau Bandar Lampung.

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 15 juli 1999 No. 151/Pid B/1999/PN.TK (sebagaimana terlampir)
- Akta permintaan banding no. 10 Akta. Pid/1999/PN TY, tertanggal 22 juli 1999 yang dibuat oleh R. Ali Machfud Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Muhammad Rozie jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang telah mengajukan banding terhadap putusan peradilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 juli 1999.

Keterangan tersebut di atas, maka dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yakni:

- a. Permintaan banding telah diajukan oleh Jjaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding diterima.
- b. Bahwa jaksa penuntut umum selaku pembanding tidak mengajukan memori banding pada tanggal 11 agustus 1999. Dan salinan memori banding telah diberikan pada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 1999 dengan seksama.
- c. Bahwa terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontak memo banding tertanggal 18 Agustus 1999 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Agustus 1999 dan salinan kontrak memori banding,

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 1999 dengan sempurna.

- d. Bahwa keputusan pengadilan negeri tanjungkarang tanggal 15 juli 1999 Nomor 15 Pid/B/1999/PN. T& sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung sejak tanggal 19 Agustus 1999 sampai dengan 26 Agustus 1999 .
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut. Pengadilan Tinggi berpendapat
 - Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak menjadikan orang takut dan jera untuk melakukan perbuatan serupa;
 - Menimbang bahwa PDAM way Rilau memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyediakan air bersih dan sehat bagi masyarakat luas, seharusnya terdakwa turut meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan air bersih, dan seharusnya harus ada perbaikan instalasi-instalasi baru, namun dalam keadaan demi dan terdakwa telah berbuat tercela, menyelewengan uang dinas untuk memperkaya diri sendiri,
 - Menimbang dalam kondisi krisis moneter yang melanda seluruh lapisan masyarakat namun terdakwa justru telah menggerogoti uang rakyat untuk membeli mobil dan juga memperbaiki rumah,
 - Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa. Sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil sepadan dengan kesalahan terdakwa. Mengingat Bab XVII bagian kesatu KUHAP, Pasal 1 ayat (1) bjo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Mengadili:
 - 1) Menerima permintaan banding dari Muhammad Rozie jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tersebut.

- 2) Menyatakan terdakwa Bastari Maudin Bin Maudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut.
- 3) Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.00 apabila ketentuan ini tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 383.850.163.00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus limapuluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- 5) Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
- 6) Memerintahkan barang bukti
 - Satu bidang tanah seluas 195 M2 dan sertifikat 1254/LIKP atas nama Bastari Maudin dikembalikan kepada terdakwa.
 - Satu unit kendaraan Toyota Kijang BE 2927 AS dan surat-surat kendaraan, serta uang tunai Rp 10.000.000.00 dirampas untuk negara cq. PDAM Way Rilau Bandar Lampung.
 - Surat bukti berupa buku Giro Bank dan surat berharga lainnya. Dikembalikan ke PDAM Way Rilau Bandar Lampung
- 7) Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara di PN Tingkat Pertama Rp 5.000,00 dan dalam Pengadilan Tinggi Banding Rp 5.000,00

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Oktober 1999, oleh Edith D. Tobing Nababan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, Daulat Simbolon, Ny. Suharti Kartono, Ny Sumini Soetjipto, dan H. Sudibyo Kartohardjono, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sidang terbuka pada hari Senin tanggal 1 November 1999 ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wakiyo sebagai Panitera Pengganti.

Memperhatikan hasil putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat dianalisis atau dipahami bahwa putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan setidaknya tidaknya membuat jera bagi orang-orang yang akan bertindak serupa. Dari dasar pertimbangan hakim, dan mengingat serta memperhatikan dari kondisi objektif, maka

dapat dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atas terdakwa Bastari Maudin bin Maudin sudah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, khusus dalam perkara pidana ada 3, yaitu:

1. Putusan bebas
2. Putusan Pemidanaan (dipidana penjara atau denda),
3. Putusan perbuatan terbukti akan tetapi, bukan merupakan tindakan pidana (Anthony Syarif: Wawancara : 17 September 2001).

Putusan pidana atas terdakwa Bastari Maudin bin Maudin sangat menarik dengan keberanian dan keyakinan hakim dalam memberi keputusan, yakni

1. Mengabulkan perkara banding atas permintaan jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjungkarang terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 151/Pid/B/1999/PN.TK
2. Menjatuhkan pidana lebih berat dari yang didakwakan jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2 (dua) tahun Penjara dan pidana denda Rp 5.000.000.00 serta subsidair 3 bulan kurungan, maka putusan Hakim Pengadilan Tinggi menjadi 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.00 apa bila pidana kurungan selama 6 bulan tidak dijalankan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 383.850.163.00.

Berdasarkan putusan dalam perkara banding atas terdakwa Bastari Maudin bin Maudin oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah sejalan dengan kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan Muladi dan Barda, Nawawi Arief 1998 bahwa ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penelitian:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan Kepada si pelanggar

Bahwa dalam menentukan sanksi tindak pidana diupayakan sebagai sarana menanggulangi kejahatan dengan memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau berjalannya (hukum) pidana hendaknya memperhatikan kepentingan

sosial sebagaimana dikemukakan oleh Bassiouni dalam bukunya *Substantive criminal Law* (1978) yang ditulis kembali oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif dalam bukunya *"Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, menyebutkan bahwa kepentingan sosial adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat,
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu, mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1998:166).

BAB IV

HUBUNGAN ANTARA APARAT DAN ENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KASUS TERPIDANA KORUPSI

A. Hubungan antara aparat dan penegak hukum

Hubungan antara aparat dan penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan praktisi hukum dalam manangani kasus tindak pidana korupsi yang diproses di Proses dipengadilan Negeri kelas 1A Tanjung karang, meliputi : hubungan dalam pemanggilan saksi atau tersangka dalam pemeriksaan, penyidikan, penuntutan penahanan, pembelaan, putusan dan pemindahan. Adapun hubungan antar aparat penegak hukum dalam menangani penyelesaian kasus tidak pidana korupsi yang dilakukan melalui sarana penal, yakni Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang ialah sebagai berikut:

1. Pemanggilan saksi atau tersangka dalam proses pemeriksaan dan atau dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan THL. Tobing (14 September 2001) selaku kadit Reserse Polda Lampung dalam kaitan tindak pidana korupsi adalah apabila ada laporan dan atau adanya laporan atau menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , maka polisi berhak untuk mengadakan pemanggilan terhadap seseorang tersebut untuk dimintai keterangan, baik sebagai saksi atau tersangka. Selanjutnya THL, Tobing menjelaskan tentang peranan polisi dengan pedoman Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia, yakni pada pasal 16 (dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 13) dan pasal 14 ayat (1a)(melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya). Oleh karena itu Kepolisian Repunblik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam penyidikan

- d. Menyuruh berhenti terhadap orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- h. Meyerahkan berkas perkara pada penuntut umum
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- j. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil sidikan, penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 16).

Setelah dilakukan kajian secara teoritis dan kondisi objektif dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran atau tindak pidana korupsi adalah demi tertib masyarakat dan adanya kepastian hukum, melindungi masyarakat dari ketakutan dan kerugian yang ditimbulkan atas penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan seharusnya terpidana di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjungkarang Bandar Lampung. Dilihat dari rasa keadilannya, maka putusan sanksi atas kasus tersebut sudah memenuhi rasa keadilan karena sepadan dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa "Bastari Maudin bin Maudin" Meskipun demikian ada pertimbangan kemanusiaan, yakni dengan mengembalikan sebidang tanah dan rumah semi permanen kepada terpidana.

Hal ini dibenarkan mengingat terpidana tersebut istri dan anak-anak, ini semua sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga untuk memberikan kendaran kepada orang lain untuk tidak melakukan hal serupa dimasa sekarang dan akan datang bagi seseorang atau masyarakat pada umumnya.

Dari Pasal 16 tersebut di atas, THL Tobing menjelaskan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi, polisi bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum adalah jaksa. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana korupsi polisi berwenang untuk melakukan

- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,

Dalam hal berkas perkara yang sudah ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau tersangka, kemudian polisi menyerahkan kepada penuntut umum, yakni jaksa. Dan pihak kepolisian menunggu, memonitor dan sewaktu-waktu siap untuk menerima pengembalian berkas perkara yang belum sempurna dan/atau memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik serta membantu penuntut umum menghadirkan saksi atau tersangka jika dalam proses penyidikan dan penuntutan mengalami kesulitan.

Hubungan lainnya adalah jika pihak kejaksaan kesulitan melakukan eksekusi terhadap terpidana, maka berhak meminta bantuan kepada polisi dan polisi siap membantunya. Hubungan polisi dengan hakim adalah hubungan integral dalam penegakan hukum, polisi sebagai penyidik dan Hakim sebagai pemutus perkara serta jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan jika pihak pengadilan memerlukan pengamanan, baik pengamanan terhadap saksi, terdakwa, dan jalannya persidangan, maka Majelis Hakim dapat meminta polisi untuk membantu mengamankan, misalnya dikhawatirkan terdakwa/terpidana kabur atau terjadi demonstrasi dari masing-masing pendukung yang berperkaranya, maka Hakim berhak meminta bantuan kepada polisi untuk pengamanan dan inilah hubungan kerja proses peradilan. Disamping itu hubungan kerja antara polisi dengan praktisi hukum atau konsultan/advokat/LBH adalah, jika ada kasus tindak pidana berat ancamannya lebih dari 5 tahun dan atau tindak pidana korupsi yang ancamannya juga berat, maka polisi dapat mendampingi saksi dan/atau tersangka dalam penyidikan. Hal ini untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama terhadap saksi/tersangka dalam menjalani

proses penyidikan sebelum diserahkan kepada penuntut hukum. Hubungan ini adalah hubungan yang saling mengikat demi kebijaksanaan penegakan hukum untuk sampai kepada proses penuntut dan pengadilan

Sedangkan dengan Lembaga Pemasyarakatan hubungan kerja Polisi adalah sebatas diminta untuk membantu pengamanan dari dan ke pengadilan orang-orang yang sedang dalam proses peradilan yang penahanannya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena dikhawatirkan terdakwa kabur sebelum sampai ke pengadilan atau sebaliknya sebelum sampai pada tempat penahanan sementara di Lembaga Pemasyarakatan juga polisi diminta untuk membantu mengamankan apabila terjadi tahanan kabur dari sel, atau terjadi keributan, tawuran di Lembaga Pemasyarakatan dan juga membantu dalam razia senjata tajam dan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Penyidikan dan Penuntutan

Peranan jaksa dalam hal penyidikan khusus mengenal kasus tindak pidana korupsi adalah menjadi tugas dan wewenang kejaksaan. Untuk perkara tindak pidana korupsi di Lampung menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi Lampung. Begitu pula peranan jaksa sebagai penuntut umum dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang maupun persidangan yang diselenggarakan dalam perkara pidana di Pengadilan Tinggi Tanjung karang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asri Agung Putra (11 - 17 September 2001) selaku Asisten Tindak Pidana Khusus UB, Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung Asri Agung Putra menjelaskan mengenai tugas umum dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, yakni dengan menunjuk beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana termasuk dalam Bab 1 Ketentuan Umum
 - Pasal 1 ayat (6)a, menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- Pasal 1 ayat (6) b, menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kerjasama Republik Indonesia.

Bahwa untuk mengetahui tugas jaksa sebagaimana dalam

- Pasal 2 ayat (1) a, mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang bewenang
- Pasal 2 ayat (1) b, menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana
- Pasal 2 ayat (2) mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Dari dua ketentuan Undang-Undang tersebut di atas khusus untuk tindak pidana korupsi, maka lebih spesifik penyidik adalah dari unsur Kejaksaan dan hal ini masuk pada bidang pidana khusus. Lebih lanjut Asri Agung Putra menyatakan dalam hal penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, ia menunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981), bahwa penyerahan ini meliputi dua tahap yaitu:

- Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Dalam hal penuntut umum berpendapat apabila hasil penyidikan belum lengkap, segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuknya yang

wajib dilengkapi oleh penyidik. Sedangkan tersangka dan barang bukti tetap ditempatkan dimana ditahan atau disimpan. Sedangkan penyerahan tahap kedua pun hanya tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dimaksudkan mencegah kemungkinan larinya tahanan atau hilangnya barang bukti.

Selanjutnya mengenai kasus tindak pidana korupsi yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan Ivan Damanik (15 September 2001) selaku jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Bastari Maudin bin audin yang telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PDAM Way Rilau Bandar Lampung. Bahwa tahapan-tahapan penanganan kasus tindak pidana korupsi tersebut yaitu:

- a. Setelah adanya laporan pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini PDAM Way Rilau Bandar Lampung, maka Kejaksaan Tinggi Lampung menunjuk beberapa jaksa untuk bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum, tentunya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 1. Penyidikan khusus
 2. Penyidikan dan
 3. Penuntutan
- b. Dalam penyidikan tersebut di atas, untuk menentukan status tersangka yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk disidangkan
- c. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri tersebut, maka status tersangka menjadi terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan beberapa tuntutan yang disertai dengan dakwaan primer, skunder, lebih skunder sampai kepada Majelis Hakim membedakan putusan pengadilan atas kasus tersebut
- d. Setelah adanya putusan pengadilan, maka pihak pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa Penuntut Umum untuk menahan dan mengeksekusi atas putusan tersebut.
- e. Setelah adanya eksekusi terhadap putusan pengadilan, maka jaksa Penuntut Umum merubah status terdakwa menjadi terpidana dan selanjutnya dilimpahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Karang

Selain penanganan kasus korupsi di atas, maka ada temuan lain mengenai kasus tindak pidana korupsi, yakni kasus Gempa Liwa atau dikenal dengan sebutan GL 99 merupakan kasus yang menggemparkan Lampung pada waktu itu, tetapi sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumnya yang tetap. Meskipun demikian data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan A. Sanusi Musa sebagai jaksa Muda (11 September 2001), yakni

- (a) Bahwa jaksa Penuntut Umum dalam kasus GL 99 memberi tuntutan dengan membuktikan perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 1 a, b, c dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971. bahwa diantaranya terdakwa telah menyalahgunakan wewenang melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, dan dalam persidangan unsur ini telah dibuktikan adanya saksi, data awal pembukuan yang tidak beres, dan lain sebagainya.
- (b) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang membebaskan terdakwa dengan alasan sebagai berikut
 - 1. Bahwa kasus GL 99 adalah merupakan "West Lampung Emergency Recontruction project, (WLERP) yang artinya kepanitiaan dalam penggalangan dana bantuan untuk pembangunan kembali Liwa Pasca Gempa tahun 1999. Dalam hal ini negara tidak dirugikan, sehingga tidak terpenuhi unsur tindak pidana korupsi
 - 2. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka hakim memutuskan perkara itu tidak berdasarkan Undang-Undang melainkan berdasarkan keyakinannya Memperhatikan hasil temuan di atas, maka hubungan kerja dalam hal penyidikan penuntutan perlu mendapat perhatian yang serius sehingga upaya dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi dapat sejalan antara Penuntut Umum dengan Putusan Pengadilan. Selain itu perlunya hubungan kerja dengan aparat kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan dan atau dalam eksekusi serta pelaksanaan sita rampas terhadap barang bukti atau uang, juga perlu kerjasama antar pihak eksekutor dengan aparat Lembaga Pemasyarakatan, sehingga fungsi penggunaan hukum pidana sebagai sarana penal untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi dapat tercapai tujuan umum demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 3. Penanganan proses peradilan sampai kepada putusan pengadilan

Bahwa dalam menangani proses peradilan sampai ada putusan pengadilan yang tetap perlu adanya hubungan antara aparat penegak hukum, seperti Polisi, jaksa, Hakim, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu perlu dikemukakan tentang tugas dan tanggung jawab seorang hakim secara kelembagaan dapat ditunjukkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Anthony Syarif (14 September 2001), sebagaimana pasal I menyebutkan bahwa kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum, maka hakim mempunyai kewajiban sebagaimana pasal 27 ayat (1), menyebutkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 27 ayat (2) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dari kewajiban hakim yang masih berpedoman pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan baru diundangkan tanggal 31 Agustus 1999, dalam kenyataannya belum berlaku secara efektif.

Dengan demikian jelas kekuasaan kehakiman adalah memegang peranan penting dalam proses peradilan dalam rangka penegakan hukum demi keadilan dan terselenggaranya Negara Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa kasus-kasus tindak pidana, termasuk didalamnya kasus tindak pidana korupsi terlebih dahulu masuk ke bidang urusan umum sebagaimana hasil wawancara dengan Suryadi (15 September 2001), menyatakan bahwa kasus-kasus tindak pidana yang masuk pemrosesannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

1. Nomor register,
2. Diserahkan kepada ketua pengadilan, yang selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk beberapa hakim yang akan menangani perkara tersebut,

3. Hakim menerima berkas perkara, selanjutnya hakim akan membuat penetapan tahanan dan penetapan hari sidang;
4. Jaksa Penuntut Umum, akan menghadapkan terdakwa berikut saksi-saksi serta barang bukti
5. Proses persidangan berjalan,
6. Putusan pengadilan tentang perkara tersebut,

Tahapan-tahapan dalam proses peradilan terhadap kasus tindak pidana di atas, maka Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan terlebih dahulu mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna Mintarsih (16 September 2001) selaku hakim anggota yang menangani kasus korupsi, menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yakni

- a. Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- b. Telah mendengar dakwaan penuntut umum, baik primer, subsider, lebih subsider,
- c. Telah mendengar eksepsi penasehat Hukum terdakwa;
- d. Telah mendengar pembacaan putusan selah;
- e. Telah mendengar keterangan saksi-saksi,
- f. Telah meneliti barang bukti dan surat bukti:
- g. Telah mendengarkan keterangan terdakwa;
- h. Telah mendengarkan keterangan ahli;
- i. Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum, maka barulah Majelis Hakim menjatuhkan putusan pengadilan

Berdasarkan proses peradilan yang menangani kasus tindak pidana di atas adalah melibatkan aparat penegak hukum diantaranya hubungan dengan hakim dengan pihak kepolisian adalah dalam hal pengamanan tahanan baik dari penitipan tahanan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang sampai

ketempat persidangan begitu pula sebaliknya hubungan kerjasama lainnya adalah pengamanan jalannya sidang di Pengadilan apabila dalam proses persidangan terjadi kerusuhan oleh pihak terdakwa dan itu oleh adanya demonstrasi yang mengakibatkan jalannya persidangan akan terganggu, maka peranan pihak kepolisian sangat penting dalam rangka pengamanan dan ketertiban jalannya sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Hubungan kerjasama antara hakim dan jaksa penuntut umum adalah dalam rangka penegakan hukum untuk mencari keadilan, lebih kongkritnya bahwa hakim harus mau membaca dan mendengar isi dakwaan jaksa yang digunakan sebagai landasan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi. Hubungan lain juga saling menempati jadwal persidangan yang telah dijadwalkan, hal ini sangat penting seandainya jadwal tidak ditepati maka jalannya persidangan akan mundur. Akibat mundurnya jadwal persidangan akan berakibat lamanya proses persidangan yang memakan waktu, biaya dan tenaga. Untuk hubungan ini perlu diperhatikan, tetapi mempengaruhi kemandirian masing-masing aparat penegak hukum.

Selanjutnya hubungan dengan penasehat Hukum adalah sangat penting. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Supriadi (15 September 2001) salah seorang dari penasehat hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa keberadaan penasehat hukum sangat diperlukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Jika ada terdakwa yang terancam, hukuman lebih dari 5 (lima) tahun maka perlu didampingi oleh penasehat hukum mulai dari penyidikan, persidangan sampai pada putusan pengadilan.

Hubungan antara hakim dan penasehat hukum dalam perkara pidana tersebut adalah penting hal ini sebagai pertimbangan hakim akan eksepsi dari penasehat hukum yang mendampingi kliennya dalam persidangan sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan keterangan dari penasehat hukum terdakwa.

4. Pemidanaan

Dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa yang telah di eksekusi oleh pihak Kejaksaan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 151/Pid/8/1999/PNTK atas nama terdakwa Bastari Maudin bin Maudin. Selanjutnya ada upaya banding oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan hasilnya telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Reg. No. 25/Pid/1999/FT.TK atas nama terdakwa Bastari Maudin bin Maudin dalam Perkara Banding Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Usmin (12 September 2001) selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungkarang, menyatakan bahwa hubungan antar aparat penegak hukum mulai sejak dalam penyidikan, penuntutan, putusan dan pemidanaan. Adapun kerjasamanya sebatas fisik tahanan tersebut, seperti contohnya tahanan yang dititipkan oleh pihak Kepolisian dengan A1; kemudian tahanan dari pihak Kejaksaan dengan (A2), tahanan dari Pengadilan Negeri dengan kode (A3), tahanan dari Pengadilan Tinggi Banding dengan kode (A4), serta tahanan dari Tingkat Kasasi dengan kode (AS).

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah ada putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum, yang tetap sudah seharusnya terdakwa tersebut dirubah statusnya menjadi terpidana dan dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak ada satupun tahanan atau terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Karang.

Berkenaan dengan kenyataan tersebut di atas, tidak saja kasus-kasus yang telah ada putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang maupun putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga kasus lainnya seperti kasus Disbun, BRI, Tanjungkarang Plaza, dan Nurdin Muhayat, tidak juga ditahan baik semasa menjadi tahanan kejaksaan, pengadilan sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan di atas jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bastari Maudin bin Maudin yang telah merugikan keuangan negara PDAM Way Rilau, namun belum ada eksekusi dari Kejaksaan Tinggi

Lampung dan belum dilakukan pemidanaan yang umumnya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Tanjung Karang.

Terhadap kasus tersebut di atas menimbulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum membuktikan bahwa teori Goldstein sebagaimana ditulis kembali oleh Muladi bahwa ada tiga tahapan-tahapan penegakan hukum yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) penegakan hukum bersifat menyeluruh; (2) penegakan hukum bersifat penuh; (3) penegakan hukum bersifat aktual (Muladi: 1988 4). Fakta yang ada di lapangan dan kajian secara teoritis dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum secara penuh pada hakekatnya hanya harapan yang tidak realistis. Kenyataan yang demikian yang mendorong para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dihadapkan pada kenyataan di lapangan terpaksa melakukan diskresi. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa penegak hukum dihadapkan pada kenyataan dilapangan terpaksa melakukan diskresi Oleh karena itu perlu carikan penegakan hukum dengan model sistem. Peradilan Pidana yang meliputi, model perlawanan, model kekeluargaan dan model terpadu. Pada model terpadu (*integrated model*) ini yang lebih ditekankan untuk upaya penegakan hukum secara terpadu antara korupsi. aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana.

B. Beberapa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terhadap tindak pidana korupsi, yakni

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti :
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa Undang-Undang ini tidak dicantumkan aturan peralihan sejak kapan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 itu diberlakukan dan sejak kapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tidak diberlakukan lagi Begitu pula belum ada fatwa dan Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 atau setidaknya-tidaknya ada

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 (A Sanusi Musa, Wawancara, 11 September, 2001).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, seperti Polri, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Praktisi Hukum Adapun hambatan yang ada pada masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

(1) Polri

Bahwa Polisi sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi mendapatkan hambatan di antaranya ialah:

- Pengumpulan data dalam penyidikan dan alat bukti untuk menjadi landasan dalam penyidikan dan alat bukti untuk menjadi landasan dalam penyidikan, penyidikan dan menentukan status tersangka. Hal ini mengingat umumnya terjadinya penyelewengan tersebut ada pada instansi-instansi pemerintah, sehingga dari prosedur pemanggilan saksi, penangkapan dan/atau penahanan, serta penyidikan sampai kepada Berita Acara lengkap dan diserahkan kepada Penuntut Umum itu melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.
- Sarana dan prasarana yang belum mendukung untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut umumnya di pemerintahan.
- Tahanan dalam kasus tindak pidana korupsi tergantung pada lama dan tidaknya proses penyidikan itu selesai, seperti ditahan 20 hari dan atau ditambah lagi masa tahanannya menjadi 30 hari karena proses penyidikan belum lengkap. Hal ini juga menjadi kesulitan tersendiri, mengingat dari segi ruang tahanan yang terbatas, pengamanan, dan pembiayaan tahanan yang tidak dianggarkan, hal ini menjadi tanggungjawab pihak kepolisian setempat (THL Tobin& Wawancara : 14 September 2001)

(2) Kejaksaan

Bahwa jaksa sebagai penyidik penuntut umum dan eksekutor atas putusan pengadilan dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara umum tidak ada, kecuali pada

- Pemanggilan saksi maupun tersangka yang kadang-kadang tidak tepat waktu sehingga jadwal yang telah ditetapkan menjadi tidak dipergunakan dengan baik. Akibatnya proses penanganan tindak pidana korupsi memakan waktu yang panjang.

- Ada beberapa pihak yang pemanggilannya menggunakan mekanisme tersendiri, contohnya:

Pemanggilan saksi atau tersangka yang kebetulan anggota DPR, baik DPR RI, DPRD 1, DPRD 11, mengingat Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 pasal 43, apabila anggota DPR dalam proses pemanggilan harus ada persetujuan dari Presiden untuk DPR RI, Menteri Dalam Negeri untuk DPRD, Gubernur untuk DPRD 11. Akibatnya memakan waktu yang lama dan kontra dengan asas "*before the law*" menjadi tidak ada.

Secara teknis ada beberapa masalah yang cukup kompetitif, baik dari segi waktu terlalu lama, barang bukti yang diharapkan terkadang pihak terkait sudah pensiun atau pindah tugas

- Dalam hal daluwarsa, misalnya proses penyidikan secara teknis sudah maksimal, tapi belum cukup alasan atau bukti untuk diangkat lebih lanjut, maka dapat dihentikan (di-SP3-kan). Hal ini sering menjadi kesulitan, kontra dari praktisi hukum dan masyarakat pendukung hukum itu sendiri. Meskipun dalam SP3 ada tiga catatan apabila dikemudian hari ditemukan alasan, bukti baru, maka dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Asri Agung Putra, Wawancara 14 September 2001).

(3) Kehakiman Bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memutuskan perkara, baik dalam putusan sela, putusan banding dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau menolak suatu perkara yang tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menjalankan proses peradilan. Dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara prinsip tidak ada hambatan, namun ada beberapa hambatan diantaranya adalah.

- a. Jika terdakwa tidak dikenakan penahanan oleh jaksa, yang dapat berakibat larinya terdakwa dan/atau tertunda karena alasan sakit, pengacaranya tidak hadir. Hal tersebut akan mengganggu proses peradilan sehingga akan memakan waktu yang lebih panjang.
- b. Jika terdakwa kasus tindak pidana korupsi tersebut, masalah menjabat pada jabatan di instansi terkait, hal ini juga akan menyulitkan sehingga waktu persidangan tidak efektif. Sedangkan persidangan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 6 secara umum disebutkan bahwa dalam memutus suatu perkara tidak boleh lebih dari 6 bulan. Hal ini juga yang menjadi hambatan tersendiri.

- c. Hambatan karena peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil wawancara dengan Anthony Syarif, 17 September 2001, bahwa hakim tidak dapat terlibat langsung dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Hal ini terkadang menjadi hambatan tersendiri. Hanya masalah-masalah korupsi yang kecil-kecil yang masuk sampai ke pengadilan, sedangkan banyak kasus besar tindak pidana korupsi yang tidak sampai kepada proses peradilan dan mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti kasus GL 99, kasus Nurdin Muhyat, kasus Alay.

(4) Lembaga Pemasyarakatan

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat penahanan sementara, maupun penahanan tetap (terpidana) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara umum tidak ada hambatan, namun ada beberapa hambatan di antaranya ialah

- a) Jika ada tahanan sakit atau meninggal dunia di ruang tahanan karena sebab tertentu.
- b) Tahanan kabur dari sel atau terjadi perkelahian antar narapidana;
- c) Tahanan yang stres, terkadang sikap dan perangainya berubah, susah makan dan ini menyulitkan petugas juga
- d) Surat resmi baik dari Kejaksaan maupun dari pengadilan ketika tahanan berstatus tersangka, terdakwa dan sampai kepada terpidana selama dalam proses persidangan. Mengingat pihak lembaga pemasyarakatan hanya mengeluarkan tahanan setelah ada surat resmi baik dari kejaksaan maupun dari pengadilan (Asmin, Wawancara, 12 September 2001)

(5) Lembaga Konsultan Hukum

Bahwa sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, salah satunya membela perkara atas klien dalam proses peradilan. Secara umum tindak pidana dan hambatan yang berarti, namun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ada hambatan, adalah;

- a. Sistem pembuktian terbalik yang masih menjadi polemik karena berbeda pendapat, baik dari ahli hukum maupun dari praktisi hukum sendiri, sehingga belum dapat diterapkan secara sempurna.

- b. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan masih banyak yang ringan dan kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat (Supriyadi, Wawancara: 15 September 2001)
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih kurang sehingga untuk upaya penegakan hukum perlu biaya dan saran penunjang yang memadai, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, dan proses rehabilitasi atau perpindahan di LP yang harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Faktor masyarakat pendukung hukum, hal ini dapat menjadikan hambatan terhadap kebijakan penegakan hukum, mengingat beberapa kasus korupsi yang sudah diketahui oleh masyarakat, baik lewat media cetak maupun media elektronik, tetapi hasil putusan pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat itu sendiri, sehingga sering menjadikan masyarakat menjadi apatis terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Terlebih lebih belum ada jaminan terhadap saksi yang melaporkan adanya penyelewengan dan atau diduga terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang.

Contoh kasusnya Endin Wahyudin yang melaporkan adanya korupsi, malah menjadi sebaliknya dituntut balik dan sekarang masih dalam proses peradilan. Dan masalah lainnya adalah opini publik yang diciptakan oleh *mass media* terkadang telah menghakimi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tetapi masyarakat sudah memberi label sebagai koruptor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dar kesimpulan yang bersifat umum, yaitu merupakan temuan-temuan baru yang dapat membedakan informasi lain sebagai tambahan analisis. Sedangkan kesimpulan yang bersifat khusus adalah menjawab permasalahan serta saran demi tercapainya tujuan penelitian. Adapun kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Jaksa penuntut umum dengan surat nomor : PDS.11-04/1JKAIN mengajukan perkara pidana banding atas putusan Pengadilan Negeri IA Tanjung karang Nomor : 151/Pid/B/1999/PNTK atas terdakwa Bastari Maudin bin Maudin ke Pengadilan Tinggi Tanjung karang sebagai upaya penegakkan hukum mengingat putusan tersebut sangat ringan dan belum memenuhi rasa keadilan.

Pengadilan Tinggi Tanjung karang menerima permintaan banding Nomor 10/Akta. Pid/1999/PNTK dan menyelenggarakan persidangan terhadap terdakwa Bastari Maudin bin Maudin serta mengambil kebijakan sebagai berikut :

Kasus-kasus tindak pidana korupsi, seperti Disbun, BRI, Tanjung karang Plaza dan kasus GL 99 belum mempunyai putusan pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum yang tetap.

Kebijakan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang dalam menyelesaikan kasus GL 99 dengan sarana penal dan hasil putusannya dengan putusan bebas. Adapun landasan pertimbangan putusan itu bahwa pemotongan dana itu berasal dari kepanitiaan, yakni "*West Lampung Emergency Recontruction Project*" (WLERP), dalam hal ini negara tidak dirugikan, sehingga tidak terpenuhi unsur tindak pidana korupsi dan hakim memutuskan bukan berdasarkan Undang-Undang melainkan berdasarkan keyakinannya.

2. Bahwa kebijakan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh "Bastari Maudin bin Maudin" yang telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PDAM Way Rilau Bandar Lampung dengan kerugian sebesar Rp. 463.850.163,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yakni:

melalui sarana penal, yaitu dengan menyelenggarakan persidangan. Diawali dengan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara setelah mendengar dakwaan Penuntut umum, eksepsi, penasehat hukum terdakwa, pembacaan putusan sela, keterangan para saksi, meneliti barang bukti dan surat bukti, mendengar keterangan ahli serta mendengar tuntutan pidana penuntut umum baik primer, skunder, dan lebih skunder.

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus ini khususnya Pasal 1 ayat (1) b KUHP jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengadili dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 subsider 1 (satu) bulan kurungan; satu unit kendaraan Toyota Kijang Standar dengan Nomor Polisi BE 2927 AS serta uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara Cq. PDAM Way Rilau Bandar Lampung.

Putusan Nomor 151/Pid/B/1999/PNTK tertanggal 15 Juli 1999 dengan terdakwa Bastari Maudin bin Maudin yang telah diproses di Pengadilan Negeri Kelas 1 A yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu merupakan kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.

Hubungan antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan dan pemindahan sebagai berikut:

Pada waktu penyelidikan, penyidikan, yakni kerjasama antar aparat kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pengaduan, atau dugaan adanya tindak korupsi, maka pihak kejaksaan memanggil saksi untuk dimintai keterangan. Apabila pemanggilan tersebut tidak dipenuhi sampai kali, maka pihak kejaksaan dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk memanggil paksa.

Pada waktu penuntutan, yakni Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sebagaimana prosedur yang berlaku, dan dalam persidangan hubungan kerja antara aparat kejaksaan dan Majelis Hakim adalah menepati jadwal persidangan sampai pada berakhirnya masa persidangan.

Pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sampai dengan adanya putusan pengadilan, maka aparat hukum yang terlibat seperti polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan melakukan hubungan kerjasama meliputi :

Polisi untuk membantu keamanan dan ketertiban atas terdakwa dari tahanan di lembaga pemasyarakatan sampai persidangan, juga memberikan ketertiban dan keamanan untuk jalannya sidang. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaannya dengan jelas dan menepati jadwal persidangan

Hakim melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penasehat hukum memberikan pembelaannya sebagai salah satu pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Lembaga pemasyarakatan menerima titipan tahanan, baik sewaktu tahanan dari Kejaksaan ataupun titipan tahanan dari Pengadilan.

Pemidanaan, yakni setelah ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumnya yang tetap, maka pihak kejaksaan diperintahkan untuk mengeksekusi terdakwa untuk dipidana penjara dan melimpahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini rampasan atau sitaan apabila kejaksaan menemui kendala, maka dapat meminta bantuan pihak Kepolisian untuk membantu.

Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap korupsi adalah sebagai berikut:

Faktor Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang tidak mencantumkan aturan Peralihan, sehingga tidak jelas sejak kapan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tidak berlaku dan sejak kapan Undang Nomor 31 Tahun 1999 Itu diberlakukan, juga belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sehingga hal ini akan berpengaruh dalam proses peradilan untuk menangani tindak pidana korupsi.

Faktor pembuktian sulitnya mencari bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti pemanggilan saksi-saksi, barang bukti atau surat bukti, memakan waktu yang lama dan juga pembiayaan yang tidak sedikit.

Faktor operasional di lapangan dalam menangani kasus korupsi sering tidak sejalan antara aparat penegak hukum, seperti dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemidanaan. Terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi tidak dilakukan eksekusi dan melimpahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan

untuk menjalani pembedaan sesuai dengan putusan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.

Faktor pembiayaan mengenai tahanan, baik tahanan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, tidak ada anggaran khusus untuk biaya tahanan sehingga terkadang memberatkan anggaran bagi masing-masing aparat penegak hukum. Ini akan berpengaruh dalam proses peradilan untuk menangani tindak pidana korupsi.

B. Saran

Dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berani memutuskan perkara korupsi dengan menghukum terdakwa seberat-beratnya. Hal ini agar menjadi jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak diikuti oleh orang lain untuk tindakan yang sama.
2. Hubungan antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi hendaknya secara terorganisasi, terpadu, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan dan pembedaan. Oleh karena itu yang paling krusial adalah peranan polisi sebagai penyidik dan jaksa juga sebagai penyidik, maka khusus untuk perkara tindak pidana korupsi hendaknya diserahkan pada jaksa sebagai penyidik.
3. Faktor penghambat dalam penegakan hukum, maka perlunya ditinjau kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk disempurnakan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera terbentuk, dan pembuktian terbaik segera terwujud. Hal ini untuk menjadi landasan dalam melaksanakan operasional penanganan tindak pidana korupsi. Disamping itu perlunya sarana dan prasarana penunjang untuk mempermudah pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, disamping peningkatan sumber daya manusianya, dan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa tergiur oleh pemberian dan atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Hussein, 1983, *Socialgy Korupsi, LP3SE, Jakarta*

Ancel, Marc, 1965. *Social Defence A Modern Aproach to criminal Problem*. Routledge & Kegan Paul. London.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya. Bandung.

-----, 1994. *Kebijakan Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana penjara*. CV. Ananta. Semarang

-----, 1997. *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Sagitarius. Bandar Lampung.

-----, 1990. *Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi*. Seminar oleh mahasiswa Pancasarjana UNDIP. Semarang.

Chidir Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi*. Bina Cipta. Jakarta.

Clayton, A. Hartjen. *Crisme ang Criminalization*. Praeger Publishe. New York

Departemen Kehakiman RI, 1981. *Pedoman Pelaksana KUHAP*.

Hamzah, Amir. 1985. *Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

Hamzah, Andi. 1982. *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Sebagai Sarana Pembangunan*. UNHAS. Ujung Pandang.

Hoefnagel, G. Peter. 1996. *The Other Side Of Criminalology*. Kluwe Deventer. Holland.

Husin, Kadri. 1999. *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

-----, 1985, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP*. Tesis. Universitas Indonesia

-----, 2000. *Kumpulan Kuliah Politik Hukum Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum*. Tanpa Publikasi, Universitas Lampung.

Dan Sunarto DM. 2000. *Diklat Prosedur Penulisan Tesis*. Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum. Universitas Lampung.

Karl O.Christiansen. 1974. *Some Consideration on the Possibility of Ration Criminal Plicy*. Resource Material Series No. 7. UNAFEL Tokyo.

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) 1981. Karya Anda Surabaya.

Koplan, John. 1973, *Criminal Justice: Introductory Cases ana Materia* The Foundation Press Inc. Mincola. New York.

Kunarto, 1991. *Tren Kejahatan dan Kebijakan Penaggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Mahyong, Mahmud. 1977. *Kamus Inggris - Indonesia*. Cipta Media Surabaya.

Marpaung. Leden. 1992. *Tindak Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Martasaputra, Momon. 1969. *asas-asas Krimnal*. Alumni, Bandung.

Moegono, R, 1991, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi. Delik Pers, Jakarta.

Muhsin, Amir. 1986. *Kajahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan*. Bina Aksara. Jakarta.

-----, 1990. *Undang-Undang Anti Monopoli dalam Kerangka Kejahatan Ekonomi*. Fakultas hukum, UNDIP Semarang.

Purnomo, Bambang, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Bima Aksara, Jakarta.

Report, Summary, 1974. Resource Material, Series, No. 7. UNEFEI, Tokyo.

Siswanto, Heni. 1998. *Sistem Peradilan Pidana*. Diklat Fakultas Hukum Unila.

Soekanto, Soerjono, 1979. *Beberapa catatan Tentang Psikology Hukum*. Alumni, Jakarta.

Sudarto, 1993. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
Stepan, Quensel, 1988. *Crisis of Criminalology, Chances for a fres Interdisciplinary Star*.

-----, 14 Tahun 1970, *Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

-----, 15 Tahun 1961. *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan*.

-----, 28 Tahun 1997. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

-----, 31 Tahun 1999. *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

-----, 31 Tahun 1999. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.